



**ANALISIS DETERMINAN PENGANGGURAN DI PULAU JAWA
TAHUN 2008-2016**

SKRIPSI

**Oleh
Muhlizul Amry
NIM 140810101154**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS DETERMINAN PENGANGGURAN DI PULAU JAWA
TAHUN 2008-2016**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
Muhlizul Amry
NIM 140810101154

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan semoga shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Drs. Sukirman M.Si dan Ibunda Holisatunnaimah tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Saudaraku Riantini Amalia, Dini Syarafina, dan Kenzi Adi Putra Z.A tersayang yang telah menjadi salah satu penyemangat dalam hidup bagi penulis;
3. Guru-guru sekolahku dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...”

(Terjemahan QS. Ar-Ra'd [13]: 11)

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim”

(HR. Ibnu Majah no. 224)

“Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, tetapi jadilah orang yang bernilai”

(Albert Einstein)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhlizul Amry

NIM : 140810101154

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Determinan Pengangguran Di Pulau Jawa Tahun 2008-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 April 2018

Yang menyatakan,

Muhlizul Amry

NIM 140810101154

SKRIPSI

**ANALISIS DETERMINAN PENGANGGURAN DI PULAU JAWA
TAHUN 2008-2016**

Oleh
Muhlizul Amry
NIM 140810101154

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Anifatul Hanim, M.Si

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Determinan Pengangguran Di Pulau Jawa Tahun
2008-2016
Nama Mahasiswa : Muhlizul Amry
NIM : 1140810101154
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 5 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc
NIP. 19560831 198403 1 002

Dra. Anifatul Hanim, M.Si
NIP. 19650730 199103 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS DETERMINAN PENGANGGURAN DI PULAU JAWA
TAHUN 2008-2016**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhlizul Amry

NIM : 140810101154

Jurusan : Ilmu Ekonomi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

27 April 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua Dr. Siti Komariyah, S.E, M.Si (.....)
NIP. 19710610 200112 2 002
2. Sekertaris Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. (.....)
NIP. 19641108 198902 2 001
3. Anggota Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si (.....)
NIP. 19630614 199002 1 001

Foto 4 x 6

Warna

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA
NIP. 19710727 199512 1 001

Analisis Determinan Pengangguran di Pulau Jawa Tahun 2008-2016

Muhlizul Amry

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan sebagai implikasi dari perkembangan diharapkan kesempatan kerja bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi. Salah satu masalah penting dalam pembangunan ekonomi adalah masalah pengangguran yang berdampak terhadap kemakmuran di suatu negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR), dan Angkatan Kerja terhadap Pengangguran di Pulau Jawa tahun 2008-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan model *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (uji F) variabel PDRB, UMR, dan Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran. Secara parsial (uji t) variabel PDRB dan Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran, sedangkan variabel UMR berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengangguran di Pulau Jawa tahun 2008-2016.

Kata Kunci: Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR), dan Angkatan Kerja.

Analysis of Determinant Unemployment in Java Island Year 2008-2016

Muhlizul Amry

Department of Economics, Faculty of Ekonomi and Business, University of Jember

ABSTRACT

Economic development is a series of businesses in the economy to develop economic activities. As an implication of the growth, it is expected to increase the employment opportunities, income and the prosperity of society. One of the most important issues in economic development is the unemployment problem that has role against the prosperity of a country. The purpose of this research is to know and analyze how big influence of Gross Regional Domestic Product (PDRB), Regional Minimum Wage (UMR), and Labor Force toward Unemployment in Java Island year 2008-2016. The data used in this research is panel data sourced from Central Bureau of Statistics (BPS). Data analysis method using panel data regression analysis with Fixed Effect Model (FEM) model approach. The results showed that simultaneously (F test) variables PDRB, UMR, and Labor Force have a significant effect on Unemployment. Partially (t test) variable of GRDP and Labor force have a significant effect on Unemployment, while the variable of UMR does not have a significant influence to Unemployment in Java Island year 2008-2016.

Keywords: *Unemployment, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Regional Minimum Wage (UMR), and Labor Force.*

RINGKASAN

Analisis Determinan Pengangguran di Pulau Jawa Tahun 2008-2016; Muhlizul Amry, 140810101154; 2018:101 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Jember.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi. Salah satu masalah penting dalam pembangunan ekonomi adalah masalah pengangguran yang berdampak terhadap kemakmuran di suatu negara. Teori pembangunan Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur dan pertumbuhan sumber daya seperti deret hitung. Dengan meningkatnya penduduk maka akan meningkatkan jumlah angkatan kerja, ketika terjadi peningkatan angkatan kerja tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas karena terbatasnya sumber daya maka kesempatan kerja berkurang sehingga akan terjadi adalah pengangguran.

Krisis global tahun 2008 diperkirakan akan mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan tenaga kerja. Dunia usaha harus membuat penyesuaian-penyesuaian usaha yang pada umumnya adalah penurunan jumlah output yang pada gilirannya berakibat pada penurunan jumlah permintaan input. Salah satunya ialah input tenaga kerja. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit.

Dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pascakrisis global mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. perkembangan TPT di Indonesia mengalami penurunan, artinya dampak dari krisis global berhasil diatasi oleh pemerintah, namun penurunan tersebut belum dapat dikatakan sebagai

pengangguran pada tingkat yang wajar atau kesempatan kerja penuh. Dalam praktiknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (atau kesempatan kerja penuh) apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4 persen.

Perkembangan rata-rata TPT tertinggi di Indonesia dari tahun 2008-2016 berada pada Pulau Jawa, yaitu dengan persentase sebesar 7,35% dan jumlah pengangguran terbesar berada di Pulau Jawa dengan persentase sebesar 63,53%, artinya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia mendominasi di pulau Jawa. Masalah pengangguran di Pulau Jawa masih menjadi suatu masalah yang harus dipecahkan, meskipun Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan upah minimum regional (UMR) di Pulau Jawa mengalami peningkatan di setiap tahunnya, namun juga diikuti dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja jika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja atau lapangan kerja baru hanya akan meningkatkan pengangguran.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB, UMR, dan angkatan kerja terhadap pengangguran di Pulau Jawa pada tahun 2008-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa panel pada tahun 2008-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Uji hipotesis menggunakan pengujian simultan (uji F), pengujian parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R^2) dan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini dilakukan di 6 Provinsi Pulau Jawa tahun 2008-2016.

Hasil dari analisis data menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.990199, artinya bahwa kemampuan pengaruh variabel PDRB, UMR, dan angkatan kerja dalam menjelaskan varian terhadap pengangguran di Pulau Jawa tahun 2008-2016 sebesar 99,02%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak dijelaskan dalam penelitian. Hasil uji F diperoleh nilai probabilitas F_{hitung} sebesar 0,000000 lebih kecil dari alpha ($\alpha=5\%$), maka variabel PDRB, UMR, dan angkatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap variabel pengangguran. Sedangkan hasil dari uji t diperoleh variabel PDRB memiliki nilai probabilitas t_{hitung} lebih kecil daripada nilai probabilitas kritis $\alpha=5\%$ ($0.0003 < 0,05$) maka variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, variabel UMR memiliki nilai probabilitas t_{hitung} lebih besar daripada nilai probabilitas kritis $\alpha=5\%$ ($0.2728 > 0,05$) maka variabel UMR berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran, dan variabel angkatan kerja memiliki nilai probabilitas t_{hitung} lebih kecil daripada nilai probabilitas kritis $\alpha=5\%$ ($0.0285 < 0,05$) maka variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.

Berdasarkan uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *correlations matrix* pada setiap variabel independen mempunyai nilai di bawah 0,8 atau di bawah batas korelasi, maka hal ini menunjukkan bahwa model dalam penelitian terbebas dari penyakit multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji Glejser menunjukkan bahwa variabel PDRB, UMR, dan angkatan kerja memiliki nilai probabilitas t_{hitung} lebih besar daripada nilai probabilitas kritis $\alpha=5\%$ maka variabel PDRB, UMR, dan angkatan kerja tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Determinan Pengangguran Di Pulau Jawa Tahun 2008-2016”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa doa, motivasi, nasihat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan pengarahan, kritik dan saran dengan kesabaran, ketulusan dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dra. Anifatul Hanim, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, pengarahan, kritik dan saran untuk menyusun karya tugas akhir dengan baik melalui suatu proses yang panjang berupa keikhlasan dan ketulusan;
3. Bapak Drs. Badjuri M.E selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendidik dari mahasiswa baru hingga semester akhir serta kerendahan hati beliau dalam membimbing mahasiswanya;
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
5. Bapak Dr. M. Miqdad, S.E., M.M.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Perpustakaan Pusat;

7. Orang tua terbaik, ayahanda Drs. Sukirman M.Si dan ibunda Holisatunnaimah yang telah menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis serta memberikan kasih sayang, doa tanpa henti, dukungan, nasihat, kerja keras dan pengorbanannya yang tidak pernah pamrih sampai saat ini;
8. Saudara kandung Riantini Amalia, Dini Syarafina dan Kenzi Adi Putra Z.A yang telah menjadi salah satu alasan untuk tetap bertahan, melangkah maju dan menjadi lebih baik lagi beserta seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa, dan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti;
9. Sahabat-sahabatku Rempong, Rudi, Iqbal, Taufik, Wahyudi, Hadi, Arif, Eli, Risma, dan Indah atas semua cerita dan kenangan bersama selama masa kuliah, baik canda tawa maupun keluh kesah;
10. Teman Seperjuanganku di UKM KSPE 'CEER', Fendi, Hom, Putri, Iir, Arfin, Heny, Dian, Bella, Sonia, Laila, Ainul, dan kakak tingkat maupun adek tingkat di keluarga besar KSPE yang telah melalui proses bersama-sama untuk menggali potensi diri dan pengalaman menjadi lebih baik, baik berupa dukungan, bantuan, semangat, kenangan, suka, duka maupun tangis;
11. Teman-teman KKN 81, Aji, Eksa, Rizal, Manda, Sari, Mirna, Ivanne, Femin dan Pusva yang telah memberikan kenangan dan pengalaman 45 hari di desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;
12. Sahabat lamaku, Apoy, Iqbal, Alief, Dayat, Iwan, Andi, Arik, Darma, Agil, Dovie, Rizal dan Yusron, Jibril sahabatku dari kecil yang telah menjadi sahabat terbaik hingga saat ini;
13. Teman seperjuangan waktu SMA, Bambang, Ana, Vindy, dan Rita yang telah bersama-sama berjuang untuk masuk perguruan tinggi negeri;
14. Teman kosan Jago yang beralamat di jalan bengawan solo II/15 yang telah menemani hari-hari waktu berada di kosan;
15. Saudara ukhuwah Hamid, Dimas, Zain dan Halim yang telah menjadi sahabat dalam ketaatan untuk tegar di atas Sunnah;
16. Seluruh Komunitas Mahasiswa Pecinta Ilmu (KMPI) yang telah memberikan hidayah Islam yang benar di atas pemahaman para Salafush Shalih.

17. Seluruh teman-teman konsentrasi Ekonomi Sumber Daya Manusia terima kasih atas pengalaman, kenangan dan perjuangan selama masa kuliah ini;
18. Seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas kenangan dan perjuangan yang sangat berharga bagi penulis;
19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Aamiin.

Jember, 5 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Pembangunan Ekonomi Malthus.....	11
2.1.2. Ketenagakerjaan	12

2.1.3. Penawaran Tenaga Kerja.....	13
2.1.4. Permintaan Tenaga Kerja.....	16
2.1.5. Keseimbangan Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja.....	18
2.1.6. Pengangguran.....	20
2.1.7. Jenis-jenis Pengangguran.....	22
2.1.8. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	25
2.1.9. Definisi Upah Minimum.....	26
2.1.10. Peraturan Tentang Upah Minimum.....	27
2.1.11. Definisi Angkatan Kerja.....	28
2.1.12. Teori Okun, Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran.....	29
2.1.13. Teori Neo Klasik, Pengaruh Upah Terhadap Pengangguran.....	30
2.1.14. Teori Malthus, Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran.....	32
2.2. Penelitian Terdahulu.....	33
2.3. Kerangka Konseptual.....	40
2.4. Hipotesis Penelitian.....	43
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	44
3.1. Rancangan Penelitian.....	44
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	44
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	45
3.4. Metode Analisis Data.....	45
3.4.1. Analisis Regresi Data Panel.....	45
3.4.2. Pengujian Model Estimasi Data Panel.....	48
3.4.3. Uji Asumsi Klasik.....	49
3.5. Uji Hipotesis.....	50
3.5.1. Uji F.....	51
3.5.2. Uji t.....	52
3.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	52
3.6. Kerangka Pemecahan Masalah.....	54
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. Gambaran Umum.....	56
4.1.1. Keadaan Geografis Pulau Jawa.....	56
4.1.2. Gambaran Pengangguran di Setiap Provinsi Pulau Jawa.....	60
4.1.3. Gambaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Setiap Provinsi Pulau Jawa.....	66

4.1.4. Gambaran Upah Minimum Regional (UMR) di Setiap Provinsi di Pulau Jawa	68
4.1.5. Gambaran Angkatan Kerja di Setiap Provinsi Pulau Jawa.....	70
4.2. Analisis Data	72
4.2.1. Analisis Hasil Pemilihan Model Terbaik Estimasi dengan <i>Panel Data</i>	72
4.2.2. Model Terbaik <i>Panel Data</i> : <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	74
4.2.3. Uji Kesesuaian (<i>Test of Goodness of Fit</i>)	76
4.2.4. Uji Asumsi Klasik.....	77
4.4. Pembahasan	80
4.4.1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pengangguran di Pulau Jawa.....	81
4.4.2. Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Pengangguran di Pulau Jawa.....	83
4.4.3. Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Pengangguran di Pulau Jawa.....	85
BAB 5. PENUTUP	88
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2008-2016 (Miliar)	6
1.2 Upah Minimum Regional (UMR) 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2008-2016 (Rupiah)	7
1.3. Angkatan Kerja 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2008-2016 (Ribu Jiwa)	8
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	38
4.1 Uji Chow	72
4.2 Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	73
4.3 Uji Hausman	74
4.4 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) Pengangguran di Pulau Jawa	75
4.5 Uji Multikolinearitas	79
4.6 Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2008-2016 (%)	4
1.2 Rata-rata Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Pengangguran di Pulau-pulau Indonesia Tahun 2008-2016 (%)	5
2.1 Kurva Penawaran	14
2.2 Kurva Penawaran Tenaga Keluarga.....	15
2.3 Kurva Penawaran Tenaga Kerja Daerah	15
2.4 Kurva Permintaan Satu Perusahaan	17
2.5 Kurva Permintaan di suatu Daerah	17
2.6 Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja Untuk satu Daerah atau Negara	18
2.7 Perubahan Permintaan Tenaga Kerja	19
2.8 Perubahan Penawaran Tenaga Kerja.....	20
2.9 Kurva Hukum Okun's	29
2.10 Kurva Fungsi Permintaan terhadap Tenaga Kerja	31
2.11 Kerangka Konseptual	42
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	54
4.1 Peta Pulau Jawa.....	56
4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta Indonesia tahun 2008-2016 (%).....	61
4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat Indonesia tahun 2008-2016 (%)	62
4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah Indonesia tahun 2008-2016 (%)	63
4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DI Yogyakarta Indonesia tahun 2009-2016 (%)	64

4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur	
Indonesia tahun 2008-2016 (%)	65
4.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten Indonesia	
tahun 2008-2016 (%)	66
4.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Setiap Provinsi Pulau	
Jawa Tahun 2008-2016 (Miliar)	67
4.9 Upah Minimum Regional (UMR) di Setiap Provinsi Pulau Jawa	
Tahun 2008-2016 (Rupiah)	69
4.10 Angkatan Kerja di Setiap Provinsi Pulau Jawa Tahun	
2008-2016 (jiwa)	71
4.12 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa	
tahun 2008-2016 (%)	82
4.13 Rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) di Pulau Jawa tahun	
2008-2016 (%)	83
4.14 Jumlah Angkatan Kerja di Pulau Jawa tahun 2008-2016 (%)	85

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Data Jumlah Pengangguran (JP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR), dan Angkatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2008-2016	95
B. Data Penelitian di LOG	98
C. Hasil Estimasi <i>Panel Data Model Common Effect Model</i> (CEM).....	100
D. Hasil Estimasi <i>Panel Data Model Fixed Effect Model</i> (FEM)	101
E. Hasil Estimasi <i>Panel Data Model Random Effect Model</i> (REM)	102
F. Hasil Uji Chow	103
G. Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	104
H. Hasil Uji Hausman	105
I. Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser	106
J. Uji Multikolinearitas	107
K. Uji Normalitas	108

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006: 3). Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dengan pendapatan nasional yang meningkat, tetapi pembangunan ekonomi dapat diwujudkan dalam upaya meniadakan, setidaknya mengurangi, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Salah satu masalah penting dalam pembangunan ekonomi adalah masalah pengangguran yang berdampak terhadap kemakmuran di suatu negara.

Teori pembangunan ekonomi Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur dan pertumbuhan sumber daya seperti deret hitung (Samuelson dan Nordhaus, 1992: 432). Pertumbuhan penduduk meningkat lebih cepat daripada sumber daya yang tersedia. Dengan meningkatnya penduduk maka akan meningkatkan jumlah angkatan kerja, ketika terjadi peningkatan angkatan kerja tanpa diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja maka yang akan terjadi adalah pengangguran semakin meningkat karena berdasarkan teori Malthus faktor produksi (sumber daya alam) terbatas menimbulkan produktivitas rendah, menyebabkan kesempatan kerja berkurang sedangkan angkatan kerja berkembang sangat pesat dan pada akhirnya pengangguran meningkat.

Pengangguran terjadi mengakibatkan adanya sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak melakukannya (Mankiw, 2007: 176). Apabila tingkat pengangguran tinggi, banyak sumber daya terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya (Sukirno, 1999: 15).

Pengangguran memiliki akibat buruk dalam perkeonomian yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu akibat buruk ke atas perkeonomian, dan akibat buruk ke atas individu dan masyarakat. Akibat buruk ke atas perkeonomian, pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai adalah lebih rendah dari pendapatan nasional potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang mungkin dicapainya. Kedua, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan dan pengangguran yang diakibatkan kelesuan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan untuk melakukan investasi di masa depan.

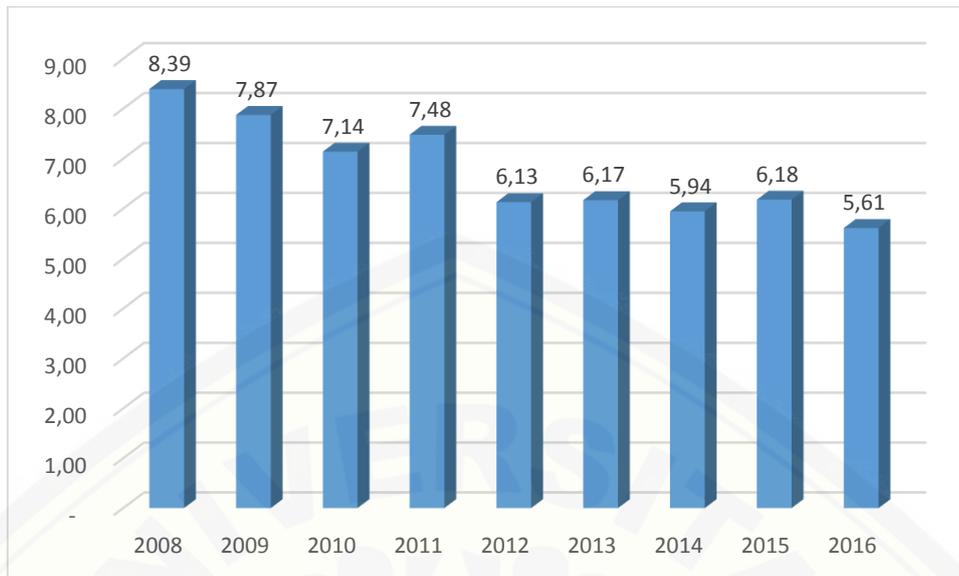
Pengangguran juga memiliki dampak akibat buruk ke atas individu dan masyarakat. Keburukan sosial yang diakibatkan oleh pengangguran adalah pertama, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktik. Pengangguran dalam periode yang lama akan menyebabkan tingkat keterampilan pekerja menjadi semakin merosot. Kedua, pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah. Berbagai tuntutan dan kritik akan dilontarkan kepada pemerintah. Kegiatan-kegiatan bersifat kriminal (pencurian dan perampokan) juga akan meningkat (Sukirno, 1999: 297-298).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki masalah pengangguran yang tinggi. Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang disebabkan oleh adanya krisis di negara Amerika Serikat dikenal sebagai *Subprime Mortgage* sehingga berdampak terhadap perkeonomian dunia. Terjadinya krisis keuangan global diperkirakan akan mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan tenaga kerja. Jika permintaan luar negeri berkurang, industri akan melakukan penyesuaian, antara lain

mengurangi produksi. Jika produksi dikurangi, kemungkinan besar sekali tenaga kerja pun akan dikurangi yang akan meningkatkan angka pengangguran. Artinya, dengan keadaan perekonomian Amerika Serikat yang tidak sehat pada tahun 2008, akan memberikan dampak langsung dan tidak langsung kepada Indonesia (Bappenas, 2009). Jika angka pengangguran tinggi, maka akan banyak output yang hilang, pendapatan menurun, dan masyarakat menderita batin karena hilangnya rasa harga diri. Dalam masa resesi, situasinya seolah-olah seperti berjuta-juta kendaraan, rumah, pakaian dan barang berharga lainnya hanya terbuang percuma dan hanyut ke lautan luas (Samuelson dan Nordhaus, 1992: 289).

Dunia usaha harus membuat penyesuaian-penyesuaian usaha yang pada umumnya adalah penurunan jumlah output yang pada gilirannya berakibat pada penurunan jumlah permintaan input. Salah satunya ialah input tenaga kerja. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja selama krisis berlangsung. Beberapa kalangan menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja seperti ini akan berdampak langsung kepada peningkatan angka pengangguran. Kemungkinan yang terburuk adalah bahwa jumlah penganggur akan meningkat sebesar jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (Bappenas, 2009). Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. Menimbang bahwa dalam rangka menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan perlu dilakukan upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan secara bipartit. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi adanya kekhawatiran pada saat krisis berhasil menyelesaikan persmasalahan antara pihak buruh dan pengusaha. Hal ini dijelaskan melalui tren tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia dari tahun 2008-2016 dijelaskan oleh data berikut.



Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2008-2016 (%)
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017)

Dinamika TPT di Indonesia pascakrisis global mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan TPT di Indonesia mengalami penurunan, artinya dampak dari krisis global berhasil diatasi oleh pemerintah, namun penurunan tersebut belum dapat dikatakan sebagai pengangguran pada tingkat yang wajar atau kesempatan kerja penuh. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi tidak hanya dapat mengganggu stabilitas keamanan namun juga stabilitas politik. Karenanya pemerintahan di semua negara selalu berusaha agar pengangguran yang terjadi berada pada tingkat yang “wajar” (Susanti, *et al*, 2000: 96). Dalam praktiknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (atau kesempatan kerja penuh) apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4 persen (Sukirno, 1999:20).

Data rata-rata perkembangan pengangguran di pulau-pulau Indonesia tahun 2008-2016 sebagai berikut.



Gambar 1.2 Rata-rata Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Pengangguran di Pulau-pulau Indonesia Tahun 2008-2016 (%) (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017)

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan TPT tertinggi di Indonesia dari tahun 2008-2016 berada pada Pulau Jawa, yaitu dengan persentase sebesar 7,35% dan jumlah pengangguran terbesar berada di Pulau Jawa dengan persentase sebesar 63,53%, artinya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia mendominasi di pulau Jawa. Selanjutnya perkembangan TPT tertinggi setelah Pulau Jawa adalah berada pada Pulau Sumatera dengan persentase sebesar 6,57% dan jumlah pengangguran terbesar setelah Pulau Jawa juga berada di Pulau Sumatera dengan persentase sebesar 20,06%. Perkembangan TPT terendah berada pada Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan persentase sebesar 3,74% dan jumlah pengangguran persentasenya sebesar 3,13%, namun perkembangan jumlah pengangguran terendah berada pada Pulau Maluku dan Papua dengan persentase sebesar 2,16%. Masalah pengangguran di Pulau Jawa masih menjadi suatu masalah yang harus dipecahkan, meskipun Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah satu mesin paling tangguh untuk menghasilkan peningkatan jangka panjang standar hidup. Apa yang terjadi pada standar hidup materi kita bergantung pada pertumbuhan pendapatan nasional (diukur, misalnya, dengan PDB) dalam

kaitannya dengan pertumbuhan penduduk (Lipsey, R. G, et all, 1997: 93). Berawal dari para pengusaha memproduksi barang dan jasa. Semakin besar permintaan, maka semakin banyak barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat perhubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Semakin tinggi tingkat pengangguran menunjukkan makin lebih buruk perekonomian (Arfida, 2003: 135).

Data produk domestik regional bruto (PDRB) di Pulau Jawa yang akan dijelaskan oleh data berikut.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2008-2016 (Miliar)

Produk domestik regional bruto (PDRB) 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2008-2016 (Miliar)									
Provinsi/ tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DKI Jakarta	677045	757697	1075183	1224218	1369433	1546876	1762316	1989330	2177120
Jawa Timur	621392	686848	990649	1120577	1248767	1382501	1537948	1692903	1855043
Jawa Barat	633283	689841	906686	1021629	1128246	1258989	1385825	1524832	1652589
Jawa Tengah	367136	397904	623225	692562	754529	830016	922471	1011851	1092031
Banten	139865	152556	271465	306174	388225	377836	428740	478544	516327
DI Yogyakarta	38102	41407	64679	71370	77248	84925	92842	101488	110098

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2017.

Tabel 1.1 menunjukkan produk domestik regional bruto (PDRB) di setiap Provinsi secara keseluruhan meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, pada triwulan III-2016 provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,40 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,02 persen, dan Pulau Kalimantan 7,72 persen (BPS, 2016). Hubungan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan pengangguran dijelaskan dengan Hukum Okun's yang menjelaskan tentang ketika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen maka akan meningkatkan pengangguran sebesar 1 persen, begitu pula sebaliknya (Samuelson dan Nordhaus, 1992: 287-288, Mankiw, 2007:249, Qadurnada, 2017, Kuntiarti, 2017, Hartanto dan Masjukri, 2017, Basuki, 2016, dan Maravian, 2015). Maka penurunan TPT di Pulau Jawa juga disebabkan oleh

pertumbuhan ekonomi. Namun, TPT masih belum mencapai penggunaan tenaga kerja penuh.

Upah Minimum Regional (UMR) menjadi standar dalam pengupahan kepada buruh di setiap wilayah. Standar ini hendaknya dipakai sebagai acuan dan bukan tujuan bagi pengusaha dalam menentukan standar upah. Sebagai acuan berarti bahwa standar tersebut dipakai agar tidak terjadi adanya upah yang berbeda di bawah kebutuhan minimum. Oleh karena itu, jika memungkinkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti misalnya masa kerja, maka pemberian upah yang berada di atas standar upah minimum harus dilakukan (Tjiptoherijanto, 1996: 96). Berikut mengenai data upah minimum regional (UMR) di Pulau Jawa.

Tabel 1.2 Upah Minimum Regional (UMR) 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2008-2016 (Rupiah)

Upah minimum Regional (UMR) 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2008-2016 (Rupiah)									
Provinsi/ tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DKI Jakarta	972604	1069865	1118009	1290000	1529150	2200000	2441000	2700000	3100000
Jawa Barat	568193	628191	671500	732000	780000	850000	1000000	1000000	2250000
Banten	837000	917500	955300	1000000	1042000	1170000	1325000	1600000	1784000
Jawa Timur	500000	570000	630000	705000	745000	866250	1000000	1000000	1273700
Jawa Tengah	547000	575000	660000	675000	765000	830000	910000	910000	1265000
DI Yogyakarta	586000	700000	745694	808000	892660	947114	988500	988500	1237700

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Data Tabel 1.2 tersebut menjelaskan bahwa UMR di 6 Provinsi Pulau Jawa semua mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hubungan upah terhadap pengangguran dijelaskan dalam teori Neo Klasik yang menjelaskan bahwa pekerja mendapatkan upah sesuai dengan imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang kepada pengusaha. Namun, ditinjau dari pengusaha maka semakin tinggi upah yang ditetapkan maka akan menurunkan jumlah orang yang bekerja karena akan menyebabnya terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga pengangguran meningkat.

Pengangguran juga berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Peningkatan angkatan kerja jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja baru hanya akan meningkatkan pengangguran. Hal tersebut karena tidak terserapnya tenaga kerja ke dalam pasar kerja atau

penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Berikut data mengenai angkatan kerja di Pulau Jawa.

Tabel 1.3 Angkatan Kerja 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2008-2016 (Ribu Jiwa)

Angkatan kerja 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2008-2016 (Ribu Jiwa)									
Provinsi/ tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jawa Barat	18743,9	18981,2	18893,8	19334	20474,8	20620,6	21006,1	20586,3	21075,8
Jawa Timur	20178,5	20338,5	19527	19513,9	20167,5	20432,4	20149,9	20274,6	19953,8
Jawa Tengah	16690,9	17087,6	16856,3	17026,1	17513,4	17524	17547	17298,9	17312,4
Banten	4325,4	4357,2	5309,4	5072,9	5177,1	5181,7	5338	5334,8	5587
DKI Jakarta	4772,4	4687,7	5272,6	5128,1	5339,9	5108,9	5063,4	5092,2	5178,8
DI Yogyakarta	1999,7	2016,6	1882,2	1924,3	1983,5	1949,2	2023,4	1971,4	2099,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Berdasarkan data Tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, namun relatif mengalami peningkatan. Hubungan angkatan kerja berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang dijelaskan oleh Malthus, yaitu pertumbuhan penduduk berdasarkan deret ukur sedangkan sumber daya seperti deret hitung sehingga kenaikan penduduk jika tidak diimbangi dengan kesempatan kerja maka pengangguran akan meningkat (Rusli, 2012: 4-5, Kuntiarti, 2017, Hartanto, 2017, dan Basuki, 2016). Faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, dan ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri (Sukirno, 1999: 14).

Berdasarkan uraian tersebut, pertumbuhan ekonomi (PDRB) di setiap Provinsi Pulau Jawa mengalami kenaikan. Upah minimum regional (UMR) juga mengalami kenaikan disetiap tahunnya, tetapi juga diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan jumlah angkatan kerja terus bertambah. Hal tersebut tidak juga menyelesaikan masalah tingkat pengangguran dalam keadaan yang wajar dan masalah pengangguran tertinggi yang berada di Pulau Indonesia. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui analisis determinan pengangguran di Pulau Jawa tahun 2008-2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh produk domestik bruto (PDRB) terhadap pengangguran di Pulau Jawa pada tahun 2008-2016?
2. Seberapa besar pengaruh upah minimum regional (UMR) terhadap pengangguran di Pulau Jawa pada tahun 2008-2016?
3. Seberapa besar pengaruh angkatan kerja terhadap pengangguran di Pulau Jawa pada tahun 2008-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk domestik bruto (PDRB) terhadap pengangguran di Pulau Jawa pada tahun 2008-2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum regional (UMR) terhadap pengangguran di Pulau Jawa pada tahun 2008-2016.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh angkatan kerja terhadap pengangguran di Pulau Jawa pada tahun 2008-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat memberikan kontribusi di dunia ilmu pengetahuan.
2. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan sebagai acuan dalam menganalisis pengangguran di Pulau Jawa.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam mengatasi masalah pengangguran di Pulau Jawa.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pembangunan Ekonomi Malthus

Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat. Dia tidak memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum tercapainya tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi menurut Malthus proses pembangunan adalah suatu proses naik-turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekadar lancar-tidaknya aktivitas ekonomi.

Malthus menitikberatkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas penduduk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut. Malthus berpendapat “pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding”. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi pertumbuhan penduduk saja tidak meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif (*effective demand*). Peningkatan pada permintaan efektif akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan.

Malthus mendefinisikan problem pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang menjelaskan perbedaan antara Gross National Product Potential (“Kemampuan menghasilkan kekayaan”) dan Gross National Product actual (“kekayaan aktual”). Tetapi problem pokoknya adalah bagaimana mencapai tingkat Gross National Product potensial yang tinggi. Menurut Malthus, besarnya Gross National Product potensial tergantung pada tanah, tenaga kerja, modal, dan

organisasi. Bila keempat faktor ini dipakai dalam proporsi yang benar, maka ia akan memaksimalkan produksi. Selain itu, Malthus juga menekankan pentingnya faktor nonekonomi dalam pembangunan ekonomi “yang termasuk dalam politik dan moral”. Faktor tersebut adalah keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; kerja keras dan kebiasaan teratur, serta sifat jujur pada umumnya. (Jhingan, 2014: 97-98)

2.1.2. Ketenagakerjaan

Di Indonesia, pengertian tenaga kerja atau *manpower* mulai sering dipergunakan. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir – pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga – walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut adalah supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja di masing-masing negara juga berbeda. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah menetapkan batas usia kerja menjadi 18 tahun. Dengan kata lain, sesuai dengan mulai berlakunya Undang-undang ini, tenaga kerja di definisikan sebagai penduduk 18 tahun atau lebih.

Indonesia tidak menganut batas umur maksimum. Alasannya adalah bahwa Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Buat golongan ini pun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mereka yang telah mencapai usia pensiun biasanya tetap masih harus bekerja. Dengan kata lain sebagian besar penduduk dalam usia pensiun masih aktif dalam

kegiatan ekonomi dan oleh sebab itu mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja.

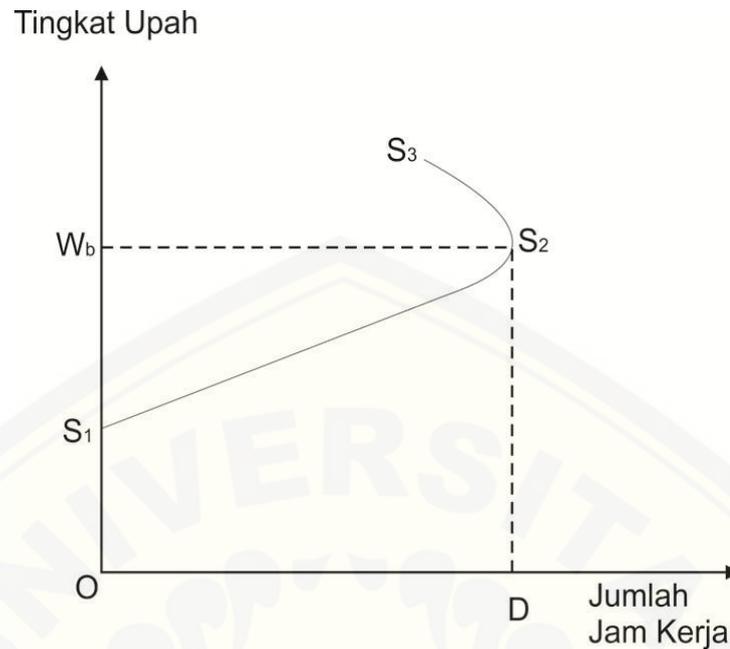
Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* terdiri dari (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai *potential labor force*. (Simanjuntak, 1998: 2)

$$\text{Tenaga kerja} = \text{Angkatan Kerja} + \text{Bukan Angkatan Kerja} \dots\dots\dots(1)$$

2.1.3. Penawaran Tenaga Kerja

Istilah penawaran tenaga kerja sudah ikut dipertimbangkan faktor upah. Dalam hal ini pencari kerja bersedia menerima pekerjaan itu, atau menawarkan tenaganya apabila kepadanya diberikan upah sekian rupiah setiap waktunya. (Suroto, 1992: 22)

Besarnya waktu yang disediakan atau dialokasikan oleh satu keluarga untuk keperluan bekerja merupakan fungsi dari tingkat upah. Hingga tingkat upah tertentu penyediaan waktu kerja dari keluarga bertambah bila tingkat upah bertambah. (Penggali garis $S_1 S_2$ pada Gambar 2.1). Setelah mencapai tingkat upah tertentu, W_b , pertambahan upah lebih lanjut justru mengurangi waktu yang disediakan oleh keluarga untuk keperluan bekerja. (Penggali garis $S_2 S_3$). Hal ini disebut *backward bending supply curve*, atau kurva penawaran yang membelok (mundur).

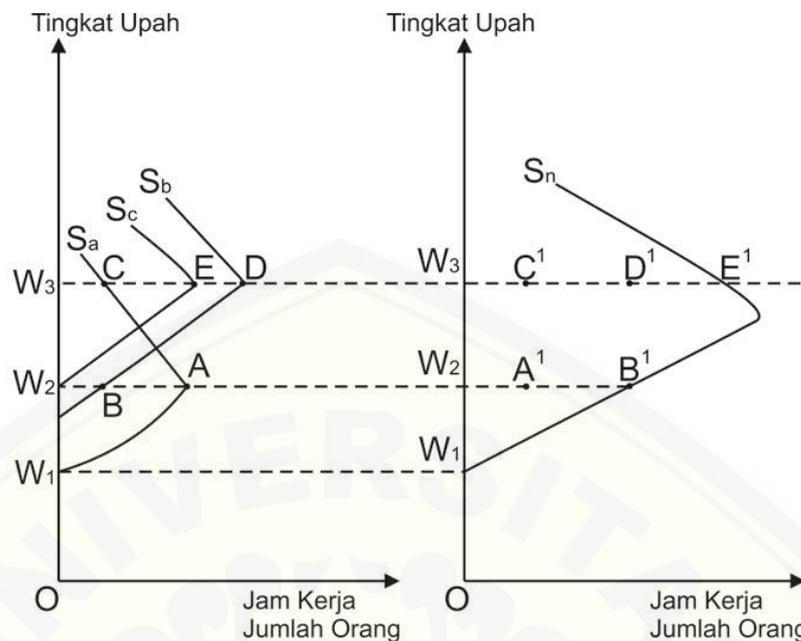


Gambar 2.1 Kurva Penawaran

Sumber: (Simanjuntak, 1998: 102)

Titik S_2 disebut titik belok, dan tingkat upah W_b , di mana kurva penawaran keluarga membelok, dinamakan tingkat upah kritis. Tiap-tiap keluarga mempunyai titik belok, tingkat upah kritis dan bentuk kurva yang berbeda, sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ada dalam masing-masing keluarga, tingkat pendapatan, serta jumlah tanggungan dari keluarga tersebut.

Untuk menyederhanakan pembahasan, misalkan dalam suatu daerah tertentu terdapat tiga keluarga, A, B dan C, masing-masing dengan kurva penawaran S_a , S_b dan S_c . (Lihat Gambar 2.2). Maka jumlah penawaran tenaga kerja di daerah tersebut adalah penjumlahan penawaran dari keluarga A, B, dan C. Penawaran tenaga kerja untuk daerah ini – sebut misalnya S_n – adalah juga merupakan fungsi dari tingkat upah (Lihat Gambar 2.3).



Gambar 2.2 Kurva Penawaran
Tenaga Kerja Keluarga

Gambar 2.3 Kurva Penawaran
Tenaga Kerja Daerah

Sumber: (Simanjuntak, 1998: 103)

Gambar 2.2 melukiskan penawaran tenaga kerja dalam daerah tertentu, sebagai penjumlahan penawaran dari tiap-tiap keluarga sebagaimana dilukiskan pada Gambar 2.2. Untuk tingkat upah W_1 , tidak ada keluarga yang menawarkan jasanya untuk bekerja. Maka penawaran tenaga kerja di daerah tersebut juga menjadi nol.

Untuk tingkat upah W_2 , keluarga A, menawarkan W_2A , keluarga B menawarkan W_2B dan keluarga C menawarkan nol. (Perhatikan Gambar 2.2). Maka untuk daerah itu, penawaran tenaga kerja adalah W_2B^1 (Lihat Gambar 2.3), yaitu W_2A^1 (yang sama dengan W_2A) ditambah dengan A_1B^1 (yang sama dengan W_2B^2). Demikian juga tingkat upah W_3 , keluarga A menawarkan W_3C , keluarga B menawarkan W_3D , dan keluarga C menawarkan W_3E . (Lihat Gambar 2.2). Penawaran untuk daerah tersebut adalah W_3E^1 (pada Gambar 2.3), yaitu penjumlahan W_3C^1 (yang sama dengan W_3C), C^1D^1 (yang sama dengan W_3D) dan D^1E^1 (yang sama dengan W_3E). Dengan melakukan hal yang serupa untuk beberapa tingkat upah yang berbeda, kurva penawaran tenaga kerja untuk daerah yang bersangkutan dapat dilukiskan, misalnya S_n dalam Gambar 2.3. Fungsi penawaran untuk satu daerah tertentu pada dasarnya mengikuti pola fungsi penawaran dari satu

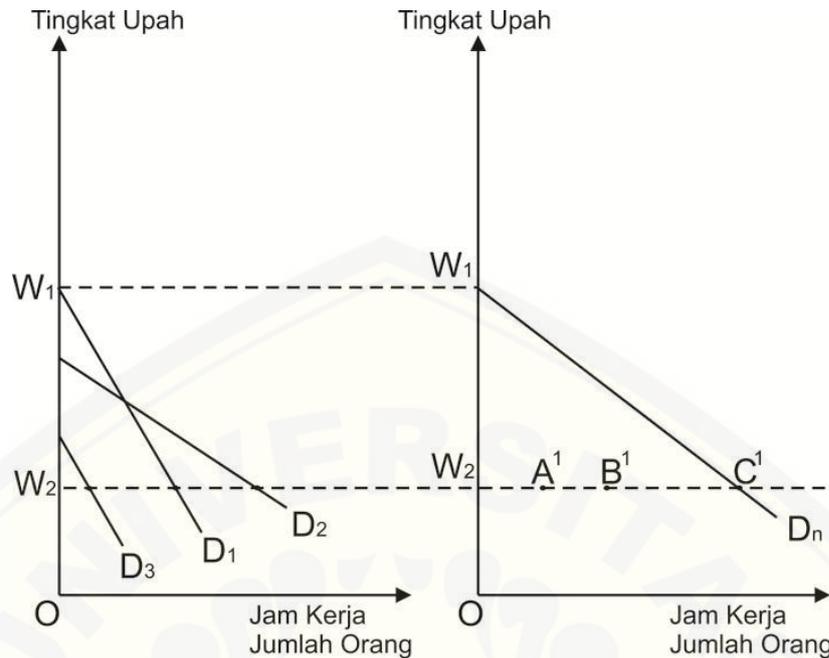
keluarga yaitu bahwa: (1) fungsi penawaran merupakan fungsi dari tingkat upah, dan (2) fungsi penawaran mempunyai titik belok dan tingkat upah kritis.

2.1.4. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah kebutuhannya yang sudah didasarkan atas kesediaan membayarkan upah tertentu sebagai imbalannya. Pemberi kerja bermaksud menggunakan atau meminta sekian orang karyawan dengan kesediaan membayar upah sekian rupiah setiap waktu. Jadi dalam permintaan ini sudah ikut dipertimbangkan tinggi-rendahnya upah yang berlaku dalam masyarakat, atau yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan. (Suroto, 1992: 21)

Permintaan akan tenaga kerja juga merupakan fungsi tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, semakin kecil permintaan pengusaha akan tenaga kerja. Ini dilukiskan dengan D_1 , D_2 dan D_3 pada Gambar 2.4. Garis-garis D_1 , D_2 , dan D_3 merupakan tiga bentuk kurva permintaan tenaga kerja dari tiga perusahaan yang berbeda. Tiap perusahaan mempunyai jumlah dan fungsi permintaan yang berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan atau produksi, jenis usaha, penggunaan teknologi, serta kemampuan manajemen dari pengusaha yang bersangkutan.

Untuk menyederhanakan pembahasan, misalkan terdapat hanya tiga perusahaan di suatu daerah tertentu, yaitu perusahaan P_1 , P_2 , dan P_3 . Permintaan dari ketiga perusahaan masing-masing dilukiskan dengan kurva D_1 , D_2 , dan D_3 . Permintaan akan tenaga kerja di daerah yang bersangkutan merupakan jumlah permintaan dari tiap-tiap perusahaan yang ada.



Gambar 2.4 Kurva Permintaan
Satu Perusahaan

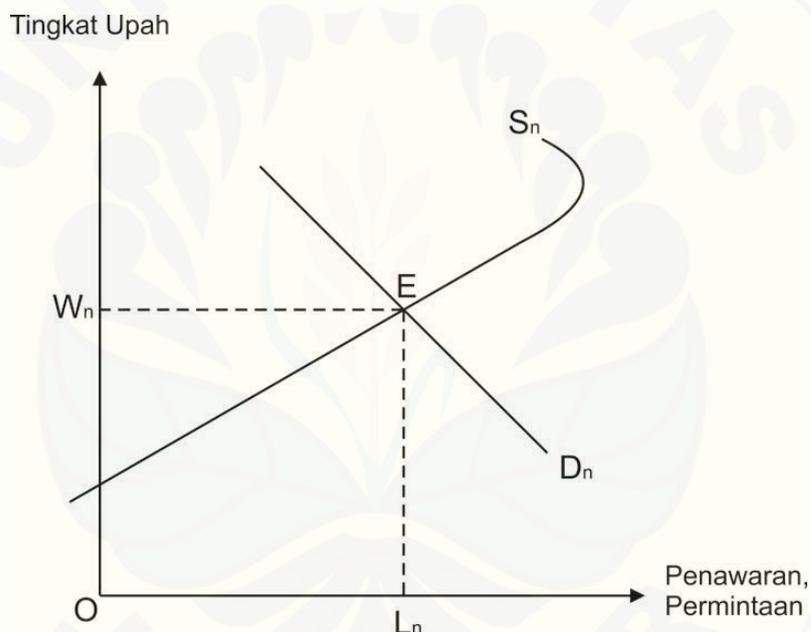
Gambar 2.5 Kurva Permintaan
di suatu Daerah

Sumber: (Simanjuntak, 1998: 105)

Untuk tingkat upah W_1 , tidak ada permintaan dari perusahaan, sehingga permintaan untuk seluruh daerah yang bersangkutan juga sama dengan nol. (Lihat Gambar 2.4 dan 2.5) untuk tingkat upah W_2 yang lebih rendah daripada W_1 , permintaan dari perusahaan P_1 pada Gambar 2.4 dilukiskan dengan garis W_2C . Jumlah permintaan akan tenaga kerja di seluruh daerah dilukiskan dengan W_2C^1 pada Gambar 2.5, yaitu sama dengan W_2A^1 (yang sama W_2A) ditambah dengan A^1B^1 (yang sama dengan W_2B) ditambah dengan B^1C^1 (yang sama dengan W_2C). Dengan melakukan hal yang serupa untuk tingkat upah yang berbeda, kurva permintaan akan tenaga kerja di daerah yang bersangkutan dapat dilukiskan, misalkan D_n pada Gambar 2.5. Sama halnya dengan permintaan dari suatu perusahaan: (1) permintaan akan tenaga kerja di suatu daerah merupakan fungsi tingkat upah, dan (2) kurva permintaan, menurun dari kiri ke kanan yang berarti semakin tinggi tingkat upah, semakin sedikit permintaan akan tenaga kerja.

2.1.5. Keseimbangan Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja dari tiap-tiap keluarga merupakan fungsi tingkat upah yang sedang berlaku. Penawaran tenaga kerja untuk suatu daerah adalah penjumlahan penawaran dari seluruh keluarga yang ada di daerah tersebut (S_n). Demikian juga permintaan akan tenaga kerja dari suatu perusahaan merupakan fungsi tingkat upah yang berlaku. Jumlah permintaan akan tenaga kerja di suatu daerah tertentu, adalah penjumlahan permintaan dari seluruh pengusaha yang ada di daerah tersebut (D_n). Jumlah penawaran (S_n) dan permintaan (D_n) di daerah yang bersangkutan kembali menentukan tingkat upah dan jumlah penempatan untuk waktu-waktu berikutnya.



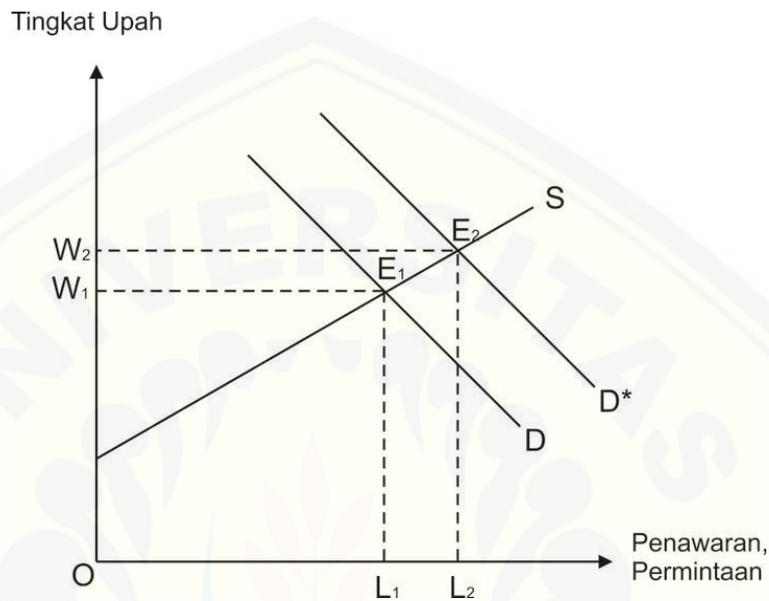
Gambar 2.6 Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Untuk satu Daerah atau Negara

Sumber: (Simanjuntak, 1998: 106)

Perpotongan antara penawaran (S_n) dan permintaan (D_n) disebut titik ekuilibrium, menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang bekerja (L_n) dan tingkat upah yang berlaku (W_n) yang kemudian dipakai sebagai patokan baik oleh keluarga maupun oleh pengusaha di daerah yang bersangkutan. S_n dan D_n pada Gambar 2.6 dapat dipandang sebagai penawaran dan permintaan untuk suatu negara. Penawaran tenaga kerja untuk negara dapat dipandang sebagai penjumlahan

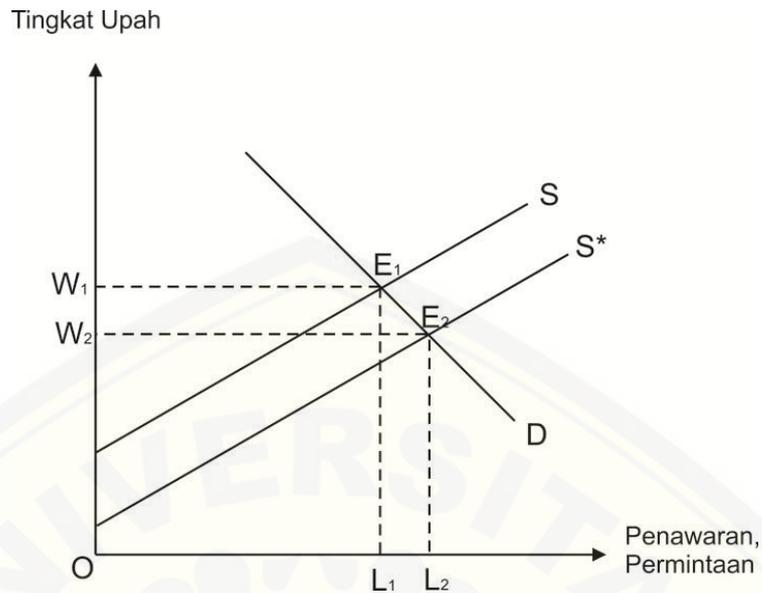
penawaran dari tiap-tiap daerah dalam negara itu atau penjumlahan penawaran dari seluruh keluarga yang ada di negara tersebut. Permintaan untuk suatu negara dapat dipandang sebagai jumlah permintaan dari tiap-tiap daerah atau dari seluruh perusahaan yang ada di negara tersebut.



Gambar 2.7 Perubahan Permintaan Tenaga Kerja

Sumber: (Arfida, 2003: 119)

Apabila permintaan tenaga kerja (dengan alasan apapun) membawa kenaikan ke D^* pada Gambar 2.7. Pada tingkat upah W_e yang ada, jumlah tenaga kerja yang diminta akan menjadi N_e yang melebihi tingkat penawaran pada tingkat upah itu. Dengan demikian, bahwa gerakan naiknya tingkat upah mendorong meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Bahkan pada hakikatnya, tingkat upah itu harus naik untuk menghapuskan kelebihan permintaan, yaitu ditentukan oleh tanggapan skedul penawaran tenaga kerja terhadap perubahan tingkat upah. Maka hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada karena banyaknya permintaan akan tenaga kerja.



Gambar 2.8 Perubahan Penawaran Tenaga Kerja

Sumber: (Arfida, 2003: 120)

Apabila penawaran tenaga kerja mengalami kenaikan dari S ke S^* pada Gambar 2.8 akan mengakibatkan suatu kenaikan dalam keseimbangan penawaran tenaga kerja dari L_1 ke L_2 . Akan tetapi, kenaikan penawaran tenaga kerja tidak dibarengi oleh suatu kenaikan atau penurunan upah yang akan mengakibatkan menurunnya upah keseimbangan dari W_1 ke W_2 , sementara seluruh penggunaan tenaga kerja (dan bersama dengan itu juga seluruh output) mengalami kenaikan. Suatu jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti setiap perusahaan dalam pasar menggunakan lebih banyak tenaga kerja yang bergerak menurun sepanjang garis skedul D . Maka perusahaan akan memperkerjakan tenaga kerja tambahan itu hanya apabila tingkat upah menurun, jika tidak maka kelebihan penawaran tenaga kerja hanya akan meningkatkan pengangguran sehingga hal ini yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran.

2.1.6. Pengangguran

Menurut Simanjuntak (1998: 15-16) mengatakan pendekatan angkatan kerja yang membedakan orang yang bekerja dan menganggur pada dasarnya menimbulkan tiga masalah pokok. Masalah yang pertama, menyangkut penentuan batas jam kerja yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini belum dapat dirumuskan

dasar konsepsional untuk memilih batas jam kerja yang tepat. Adanya penentuan batas jam kerja yang berbeda-beda mengakibatkan kekaburan pengertian dari definisi bekerja dan menganggur.

Kedua, pembedaan tenaga kerja atas dua golongan yang bekerja dan menganggur tidak menggambarkan masalah tenaga kerja yang sebenarnya. Pemilihan batas jam kerja yang pendek, misalnya satu jam dalam seminggu, memberikan tingkat pengangguran yang rendah. Angka golongan yang bekerja menjadi dibesar-besarkan karena sebagian dari golongan ini sebenarnya bekerja hanya beberapa jam saja dalam seminggu.

Ketiga, pembedaan atas orang yang bekerja dan menganggur tidak menunjukkan apa-apa mengenai tingkat pendapatan dan produktivitas seseorang. Pada dasarnya orang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Ada orang yang bekerja 40 jam seminggu atau lebih tetapi pendapatannya rendah, sedang yang lain bekerja kurang dari 20 jam misalnya akan tetapi penghasilannya lebih besar.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, akhir-akhir ini diperkembangkan apa yang disebut pendekatan penggunaan tenaga kerja (*labor utilization approach*). Pendekatan ini menitikberatkan pada seseorang apakah dia cukup dimanfaatkan dalam kerja dilihat dari segi jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan pendapatan yang diperoleh. Dengan pendekatan ini dibedakan angkatan kerja dalam tiga golongan yaitu orang yang: (a) menganggur, yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja (*open unemployed*) dan berusaha mencari pekerjaan; (b) setengah menganggur (*under-employed*), yaitu mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja (*under-utilized*) dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan; dan (c) bekerja penuh atau cukup dimanfaatkan. Setengah penganggur (*underemployed persons*) dapat digolongkan berdasarkan jumlah jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan dalam dua kelompok, yaitu (i) setengah penganggur kentara (*visible underemployed*) yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu; (ii) setengah menganggur tidak kentara (*invisible underemployed*) atau penganggur terselubung (*disguised unemployed*), yaitu mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah.

Menurut Simanjuntak (1998: 5) penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Penganggur adalah orang yang mampu bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan ingin bekerja atau baik secara aktif, maupun pasif mencari pekerjaan. Dia adalah anggota angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran adalah kejadian atau keadaan orang sedang menganggur.

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didasarkan pada konsep seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya (Kuncoro, 2000: 174). Menurut Sukirno (1999: 190) pengangguran terbuka (*open unemployment*) merupakan tenaga kerja yang sepenuhnya menganggur. Tingkat pengangguran (*unemployment rate*) mengukur banyaknya angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dipanggil bekerja kembali (Dornbusch, 2008: 42). Tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persen (Simanjuntak, 1998: 5). Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen (Susantin, et all, 2000: 99).

2.1.7. Jenis-jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2008: 328-329) jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penggolongan ini pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut:

1. Pengangguran normal atau friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat,

pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

2. Pengangguran siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi dan ini akan mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyak. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

3. Pengangguran struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut : wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

4. Pengangguran teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Menurut Sukirno (2008: 330-331) jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat pula digolongkan sebagai berikut:

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan

digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

3) Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

4) Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*) dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

2.1.8. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1992:112) Produk Domestik Bruto (GDP) adalah jumlah output total yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun. Menurut Mankiw (2007:17) Produk domestik bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan GDP adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode tertentu. Produk domestik bruto (GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu.

Menurut Sukirno (1999: 33) mengatakan bahwa di negara-negara berkembang, yang sering juga dinamakan sebagai “Dunia Ketiga” konsep Produk Domestik Bruto adalah konsep yang paling penting kalau dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Produk Domestik Bruto (PDB) dapatlah diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Produk domestik bruto atau dalam istilah Inggrisnya *Gross Domestic Product (GDP)*, adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warganegara negara tersebut dan negara asing.

Menurut Tarigan (2015: 18-19) Produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate costi*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa, tanah dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Jadi, dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya, akan menghasilkan produk domestik regional bruto atas dasar harga.

2.1.9. Definisi Upah Minimum

Peraturan Pemerintah No.78/2015 memberikan pengertian mengenai upah, upah minimum dan upah pokok minimum sebagai berikut:

Upah: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah Minimum: merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:

- a. Upah tanpa tunjangan; atau
- b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Yang dimaksud dengan “Upah pokok” adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “tunjangan tetap” adalah pembayaran kepada Pekerja/Buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.

Menurut Tjiptoherijanto (dalam Ananta: 1990: 44) mengatakan di samping definisi tersebut, maka DPP FBSI menetapkan definisi upah minimum, sebagai upah permulaan yang diterima oleh seorang pekerja yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara minimal. Dari definisi tersebut, terlihat dua unsur penting, yaitu:

- 1) Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh pekerja pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.
- 2) Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan keperluan rumah tangga, dan kebutuhan dasar lainnya.

Berbagai pandangan mengenai upah dari sisi pekerja maupun produsen dapat diuraikan:

Upah menurut produsen: biaya yang harus dibayarkan kepada pekerja dan diperhitungkan dalam penentuan biaya total.

Upah menurut pekerja: pendapatan yang diperoleh dari penghasilan menggunakan tenaganya kepada produsen.

2.1.10. Peraturan Tentang Upah Minimum

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 pasal 44 formula perhitungan upah minimum adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan. Rumus:

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\} \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

UM_n = Upah minimum yang akan ditetapkan.

UM_t = Upah minimum tahun berjalan.

$Inflasi_t$ = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

ΔPDB_t = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

2.1.11. Definisi Angkatan Kerja

Menurut Suroto (1992: 28) mengatakan bahwa angkatan kerja merupakan sebagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai pekerjaan dan yang tidak mempunyai pekerjaan, tapi secara aktif atau pasif mencari pekerjaan. Dengan kata lain juga dapat dikatakan, bahwa angkatan kerja ialah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Kata “mampu” di sini menunjuk kepada tiga hal. Pertama, mampu fisik, yaitu sudah cukup umur, jasmani sudah cukup kuat, dan tidak mempunyai cacat badan yang menghilangkan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan. Kedua mampu mental, mempunyai mental yang sehat, dan tidak memiliki kelainan atau penyakit psikis yang tidak memungkinkannya untuk melakukan pekerjaan yang normal. Ketiga, mampu yuridis, yaitu tidak kehilangan kebebasan untuk memiliki dan melakukan pekerjaan.

Sedangkan kata “bersedia” berarti orang yang bersangkutan dapat secara aktif, maupun secara passif atas kemauannya sendiri mencari pekerjaan. Di sini tidak ada unsur paksaan dan yang ada ialah kebebasan pribadi untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Kata “angkatan” dalam istilah angkatan kerja lebih menunjuk kepada pengertian kelompok daripada individual, seperti halnya angkatan bersenjata. Istilah ini dipilih oleh Kementerian Perburuhan untuk terjemahan “*labour force*” analog dengan istilah Angkatan Bersenjata, dan digunakan dalam Survei Jawa-Madura dalam tahun 1958.

Tenaga kerja terdiri dari : (1) angkatan kerja (*labor force*) dan (2) bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) adalah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja tetapi siap untuk mencari kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, dan para penyandang cacat, lanjut usia. (Tjiptoherijanto, 1996: 4-5)

2.1.12. Teori Okun, Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran

Hukum Okun (*Okun's Law*) mengatakan bahwa untuk setiap 2 persen penurunan GNP secara relatif terhadap GNP potensial, tingkat pengangguran akan naik satu persen. Misalnya, jika GNP mulai pada titik 100 persen dari jumlah potensialnya dan turun 98 persen dari tingkat tersebut, maka tingkat pengangguran akan naik sebesar 1 persen, misalnya dari 6 menjadi 7 persen.



Gambar 2.9 Kurva Hukum Okun's

Sumber: (Samuelson dan Nordhaus, 1992)

Kita dapat menggunakan contoh sejarah yang melibatkan 3 tahun stagnasi ekonomi, yaitu sejak 1979 hingga 1982 untuk mengilustrasikan kaidah Okun. Sejak tahun 1979 sampai dengan 1982, GNP riil aktual Amerika Serikat tidak meningkat sama sekali. Akan tetapi GNP potensial berkembang 3 persen per tahun selama 3 tahun tersebut. bisa dikatakan bahwa pertumbuhan GNP potensial adalah 9 persen dari tahun 1979 sampai 1982. Menurut kaidah Okun, setiap 2 persen penurunan GNP dari tingkat potensialnya, tingkat pengangguran naik satu-satuan persen.

Maka merosotnya GNP sebesar 9 persen akan mendongkrak jumlah pengangguran sebesar 4,5 persen di tahun 1979, maka kaidah Okun akan memperkirakan bahwa angka pengangguran di tahun 1982 adalah 10,3 persen. Statistik pemerintah ternyata menunjukkan angka pengangguran sedikit di bawahnya, yaitu 9,7 persen di tahun 1982. Hal ini benar-benar merupakan ketepatan angka yang cukup tinggi dalam ilmu pengetahuan yang tidak pasti, seperti halnya ilmu ekonomi. Dari contoh tersebut tampak bahwa kaidah Okun menjadi satu hal pokok dalam kaitan antara pasar output dengan pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan hubungan antara pergerakan jangka pendek dalam GNP riil dan perubahan dalam pengangguran. (Samuelson dan Nordhaus, 1992: 287-288)

2.1.13. Teori Neo Klasik, Pengaruh Upah Terhadap Pengangguran

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan, tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan pertambahan hasil marjinal dari faktor produksi tersebut. Ini berarti bahwa pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marjinal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Dengan kata lain tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha adalah:

$$W = VMPP_L = MPP_L \times P \dots\dots\dots (4)$$

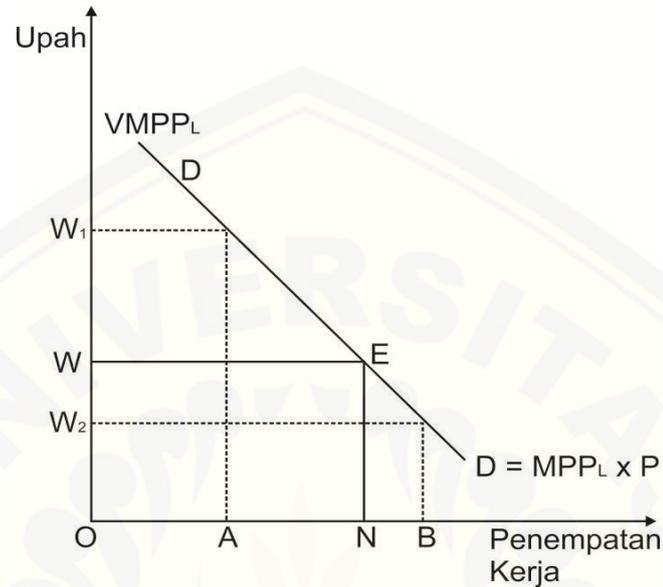
W = tingkat upah (dalam arti *labour cost*) yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja;

P = harga jual barang (hasil produksi) dalam rupiah per unit barang;

MPP_L = *marginal physical product of labor* atau pertambahan hasil marjinal pekerja, diukur dalam unit barang per unit waktu; dan

VMPP_L = *value of marginal physical product of labor* atau nilai pertambahan hasil marjinal pekerja atau karyawan

Nilai pertambahan hasil marjinal $VMPP_L$, merupakan nilai jasa yang diberikan oleh pekerja kepada pengusaha. Sebaliknya upah, W , dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan terhadap jasa pekerja yang diberikan kepada pengusaha.



Gambar 2.10 Kurva Fungsi Permintaan terhadap Tenaga Kerja

Sumber: (Simanjuntak, 1998: 90)

Sebagaimana ditunjukkan dengan Gambar 2.10, selama nilai pertambahan hasil marjinal pekerja lebih besar daripada upah yang dibayarkan oleh pengusaha ($VMPP_L > W$), pengusaha dapat menambah keuntungan dengan menambah pekerja. Di pihak lain, pengusaha tentu tidak bersedia membayar upah yang lebih besar dari nilai usaha kerja yang diberikan pekerja kepada pengusaha. Dilihat dari segi pekerja, mereka tidak bersedia menerima upah yang lebih rendah daripada nilai usaha kerjanya. Bila pengusaha tertentu membayar upah yang lebih rendah dari nilai usaha kerja pekerjanya, maka pekerja tersebut akan mencari pekerjaan di tempat lain yang mampu membayar sama dengan usaha kerjanya.

Dengan kata lain, dengan asumsi adanya mobilitas sempurna, pekerja akan memperoleh upah senilai pertambahan hasil marjinalnya sebagaimana dinyatakan dalam persamaan (4). Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut teori Neo Klasik, pekerja memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marjinalnya. Dengan kata lain, upah dalam hal ini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut kepada pengusaha (Simanjuntak, 1998:127-128).

2.1.14. Teori Malthus, Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran

Teori kependudukan Malthus merumuskan dua postulat, yaitu:

1. Bahwa pangan dibutuhkan untuk hidup manusia, dan
2. Bahwa kebutuhan nafsu seksual antar jenis kelamin akan tetap sifatnya sepanjang masa.

Atas dasar postulat tersebut Malthus menyatakan bahwa, jika tidak ada pengekanan, kecenderungan pertambahan jumlah manusia akan lebih cepat dari pertumbuhan subsisten (pangan). Perkembangan penduduk akan mengikuti deret ukur, sedangkan perkembangan subsiten (pangan) mengikuti deret hitung dengan interval waktu 25 tahun seperti berikut:

Penduduk:		dst
	1 2 4 8 16 32 64 128	
Pangan :		dst
	1 2 3 4 5 6 7 8	

Menurut Malthus, pengekanan perkembangan penduduk dapat berupa pengekanan segera dan pengekanan hakiki. Faktor pengekanan hakiki adalah pangan, sedangkan pengekanan segera dapat berbentuk pengekanan prefentif dan pengekanan positif. Pengekanan prefentif adalah faktor yang bekerja mengurangi angka kelahiran. Pengekanan prefentif yang dianjurkan Malthus adalah pengendalian diri dalam hal nafsu seksual antar jenis seperti penundaan perkawinan. Pengekanan positif merupakan faktor yang mempengaruhi angka kematian; dapat berupa epidemi, penyakit dan kemiskinan (Rusli, 2012: 4-5).

Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang pesat secara otomatis akan meningkatkan jumlah angkatan kerja sehingga ketika terjadi peningkatan angkatan kerja tanpa diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja maka yang akan terjadi adalah pengangguran semakin meningkat karena berdasarkan teori Malthus faktor produksi (sumber daya alam) terbatas menimbulkan produktivitas relatif rendah, menyebabkan kesempatan kerja berkurang sedangkan angkatan kerja berkembang sangat pesat dan pada akhirnya pengangguran meningkat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Luthfi Qadrunnada (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi Dan Rasio Gini Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015”. Variabel dalam penelitian ini adalah pendidikan (X_1), rasio gini (X_2), laju pertumbuhan ekonomi (X_3), dan tingkat pengangguran terbuka (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan rasio gini berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2010-2015. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode dengan analisis kuantitatif menggunakan regresi data panel. Dalam estimasi model regresi data panel menggunakan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* melalui uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa AMH (Angka Melek Huruf) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koefisien sebesar -0,279847 dan probabilitas signifikan dengan nilai 0,0038. Hal ini berarti semakin tinggi AMH (Angka Melek Huruf) diharapkan dapat meminimalisir tingkat pengangguran terbuka. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koefisien senilai -1,247201 dan probabilitas signifikan sebesar 0,0001. Hal ini menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan produksi barang dan jasa serta faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja yang akan menyebabkan banyaknya permintaan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. rasio gini tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan koefisien senilai 2,143711 dan dengan probabilitas 0,3585 dengan demikian perubahan rasio gini tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dita Dewi Kuntiarti (2017) dengan judul “Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, Dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2010-2015”. Variabel dalam penelitian ini adalah inflasi (X_1), jumlah penduduk (X_2), upah minimum

kabupaten/kota (X_3), dan tingkat pengangguran terbuka (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, jumlah penduduk, dan kenaikan upah secara parsial dan simultan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Terdapat tiga model estimasi, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Penentuan model estimasi data panel menggunakan uji Chow dan Uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010 sampai dengan 2015. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar $0,5699 > 0,05$ dengan koefisien $-0,080207$. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010 sampai dengan 2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$ dengan koefisien $-38,16343$. Kenaikan upah minimum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengangguran terbuka di Provinsi tahun 2010 sampai dengan 2015. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar $0,0439 < 0,05$ dengan koefisien $-0,043885$. Inflasi, jumlah penduduk dan kenaikan upah minimum berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Hal ini terlihat dari nilai prob. F-statistic $0,000000 < 0,05$.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Miftah Intan Nurjanah (2017) dengan judul “Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2015”. Variabel dalam penelitian ini adalah upah minimum Kabupaten/Kota (X_1), Inflasi (X_2), tingkat kemiskinan (X_3), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_4) dan tingkat pengangguran terbuka (Y). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengangguran di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2010–2015 dan seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Tengah tahun 2010-2015 itu berpengaruh. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Pengujian model dalam penelitian ini menggunakan uji chow dan uji hausman untuk mengetahui penggunaan model yang lebih tepat antara *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model*

(*REM*). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, tingkat kemiskinan, PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Jawa Tengah, namun Upah Minimum Karyawan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah. Uji determinasi (R^2) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah 14,9673% dipengaruhi oleh upah minimum karyawan, inflasi, tingkat kemiskinan, dan PDRB. Sedangkan sisanya sebesar 85,0327% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Karyawan, inflasi, tingkat kemiskinan, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010–2015.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Trianggono Budi Hartanto dan Siti Umajah Masjkuri (2017) dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kotaprovisi Jawa Timur Tahun 2010-2014”. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk (X_1), tingkat pendidikan (X_2), upah minimum (X_3), produk domestik regional bruto (PDRB) (X_4) dan tingkat pengangguran terbuka (Y). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum dan PDRB secara simultan dan parsial terhadap jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode data panel (*pooled data*). Metode *Random Effect Model (REM)* dipilih sebagai metode estimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, variabel pendidikan dan variabel PDRB menunjukkan arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah pengangguran di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. Variabel upah minimum terhadap jumlah pengangguran menunjukkan arah negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang menganggur di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Helin Garlinia Yudawisastra (2015) dengan judul “Effect of Minimum wage, GDP and population against Open

unemployment rate in West Java in 2010-2013". Variabel dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1), Upah Minimum (X_2), Jumlah Penduduk (X_3), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Y). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Pengolahan data menggunakan *Random effect model (REM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,2464, menjelaskan bahwa ketika PDRB mengalami kenaikan 1% akan menyebabkan tingkat pengangguran di Jawa Barat tahun 2010-2013 akan meningkat sebesar 0,24%. Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar -0,17, menjelaskan bahwa ketika Upah minimum mengalami kenaikan 1% akan menyebabkan tingkat pengangguran di Jawa Barat tahun 2010-2013 mengalami penurunan sebesar 0,17%. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,7665, menjelaskan bahwa ketika jumlah penduduk mengalami kenaikan 1% akan menyebabkan tingkat pengangguran di Jawa Barat tahun 2010-2013 akan mengalami penurunan sebesar 0,76%.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya sehingga menjadi suatu keunggulan dan keterbatasan dalam penelitian. Keunggulan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen, yaitu angkatan kerja. Karena menjelaskan pengaruh langsung terhadap pengangguran, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel jumlah penduduk sebagai variabel independen. Jumlah penduduk dapat dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja tidak dapat memengaruhi pengangguran karena tidak termasuk seseorang yang mencari kerja, kecuali golongan bukan angkatan kerja berubah menjadi golongan angkatan kerja. Selain itu, keunggulan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan merupakan data terbaru, yaitu dari tahun 2008-2016.

Keterbatasan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga berlaku tidak dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara riil, namun dapat menggambarkan

pergeseran dan struktur ekonomi di suatu negara. Karena dalam penelitian ini tahun dasar tidak sama jika menggunakan PDRB menurut harga konstan. Selain itu, keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian, hanya memfokuskan pada Provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa.



Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	Qadrunnada (2017)	Analisis Pengaruh Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi Dan Rasio Gini Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015	pendidikan (X_1), rasio gini (X_2), laju pertumbuhan ekonomi (X_3), dan tingkat pengangguran terbuka (Y)	<i>Common Effect Model, Fixed Effect Model</i> atau <i>Random Effect Model</i>	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa AMH (Angka Melek Huruf) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. rasio gini tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Kuntiarti (2017)	Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, Dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2010-2015	inflasi (X_1), jumlah penduduk (X_2), upah minimum kabupaten/kota (X_3), dan tingkat pengangguran terbuka (Y)	<i>Common Effect Model, Fixed Effect Model</i> atau <i>Random Effect Model</i>	Hasil penelitian menunjukkan inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010 sampai dengan 2015. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010 sampai dengan 2015. Kenaikan upah minimum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengangguran terbuka di Provinsi tahun 2010 sampai dengan 2015. Inflasi, jumlah penduduk dan kenaikan upah minimum berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Banten tahun 2010 sampai dengan tahun 2015
3.	Nurjanah (2017)	Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2015	upah minimum Kabupaten/Kota (X_1), Inflasi (X_2), tingkat kemiskinan (X_3), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_4) dan tingkat pengangguran terbuka (Y)	<i>Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM)</i> atau <i>Random Effect Model (REM)</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi, tingkat kemiskinan, PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015, namun Upah Minimum Karyawan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah 2010-2015.

4.	Hartanto dan Masjkuri (2017)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kotaprovinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014	jumlah penduduk (X_1), tingkat pendidikan (X_2), upah minimum (X_3), produk domestik regional bruto (PDRB) (X_4) dan tingkat pengangguran terbuka (Y)	<i>Random Effect Model (REM)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, variabel pendidikan dan variabel PDRB menunjukkan arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap variabel jumlah pengangguran di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. Variabel upah minimum terhadap jumlah pengangguran menunjukkan arah negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang menganggur di kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur.
5.	Helin Garlinia Yudawisastra (2015)	Effect of Minimum wage, GDP and population against Open unemployment rate in West Java in 2010-2013	Produk domestik regional Bruto (PDRB) (X_1), upah minimum (X_2), jumlah penduduk (X_3), dan tingkat pengangguran terbuka (Y)	<i>Random effect model (REM)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan, Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah tahun 2010-2013.

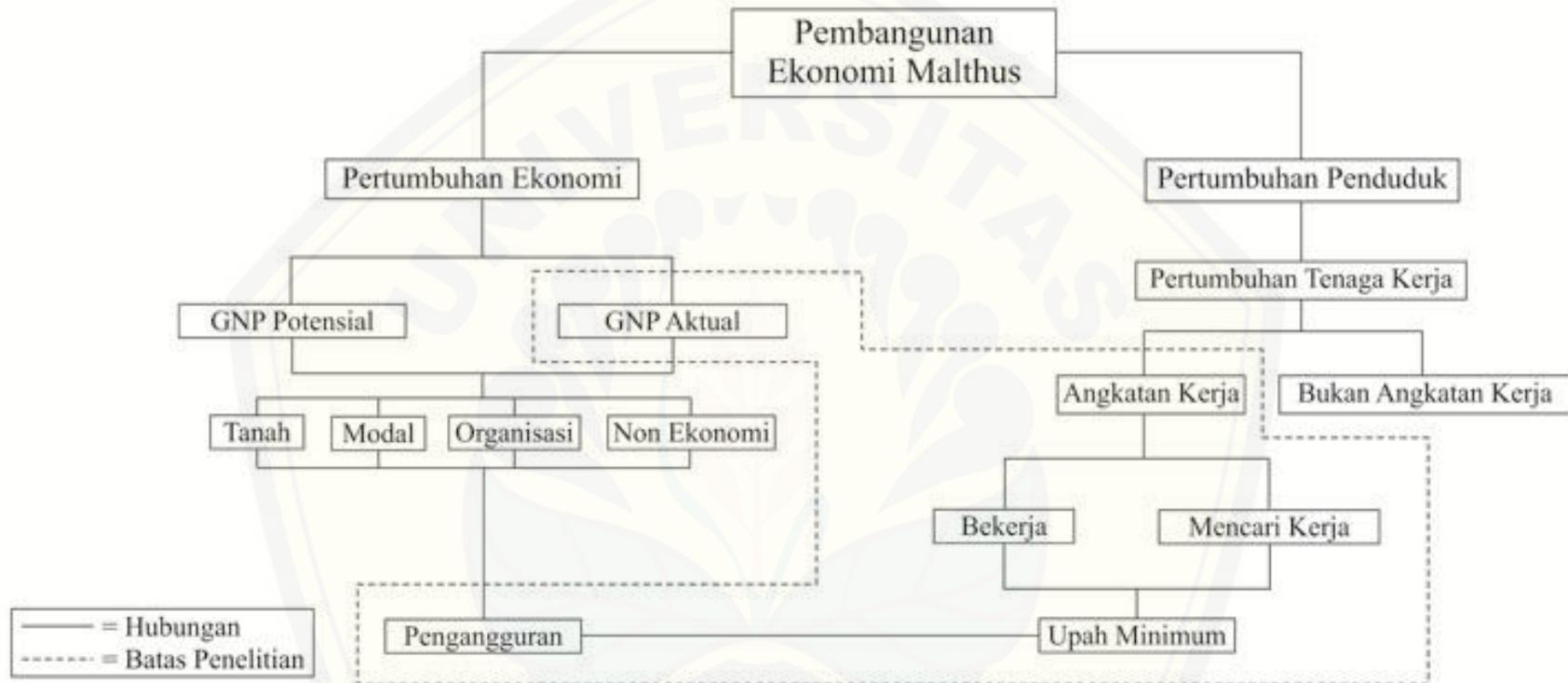
2.3. Kerangka Konseptual

Pembangunan ekonomi Malthus menyebutkan bahwa perkembangannya dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi menjelaskan adanya perbedaan pendapatan nasional secara potensial dan aktual, tetapi masalahnya bagaimana suatu negara mencapai pada tingkat pendapatan nasional potensial yang tinggi. Pendapatan nasional tergantung pada tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Keempat faktor ini akan memaksimalkan produksi sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu, Malthus juga menyebutkan adanya faktor non ekonomi dalam pembangunan ekonomi, yaitu politik dan moral. Faktor tersebut adalah keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, kerja keras dan kebiasaan teratur, serta sifat jujur pada umumnya. Hubungan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) aktual memiliki hubungan dengan pengangguran. Hal ini dijelaskan oleh teori hukum Okun's yang menyatakan semakin tinggi PDB maka akan mengurangi pengangguran (Kuntiarti, 2017, Hartanto dan Masjukri, 2017, Basuki, 2016, dan Maravian, 2015).

Malthus mengatakan pertumbuhan penduduk seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan sumber daya seperti deret hitung. Artinya, pertumbuhan penduduk akan meningkat lebih cepat ibarat deret ukur. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja yang juga akan meningkatkan angkatan kerja di suatu negara. Jika angkatan kerja meningkat tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang tinggi maka akan menyebabkan pengangguran meningkat karena sumber daya alam terbatas menimbulkan produktivitas rendah, menyebabkan kesempatan kerja berkurang sedangkan angkatan kerja berkembang sangat pesat dan pada akhirnya pengangguran meningkat (Kuntiarti, 2017, Hartanto, 2017, dan Basuki, 2016). Upah minimum juga memiliki hubungan dengan angkatan kerja untuk dapat terserap ke pasar kerja. Tingginya upah minimum maka semakin besar jumlah pekerja yang dibuang atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tidak mampu untuk membayar gaji karyawan. Namun, rendahnya upah minimum maka para pekerja tidak akan cukup

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Puspadjuita, 2018, Kuntiarti, 2017, Hartanto dan Masjukri, 2017, Nurjannah, 2017, dan Yudawisastra, 2015).



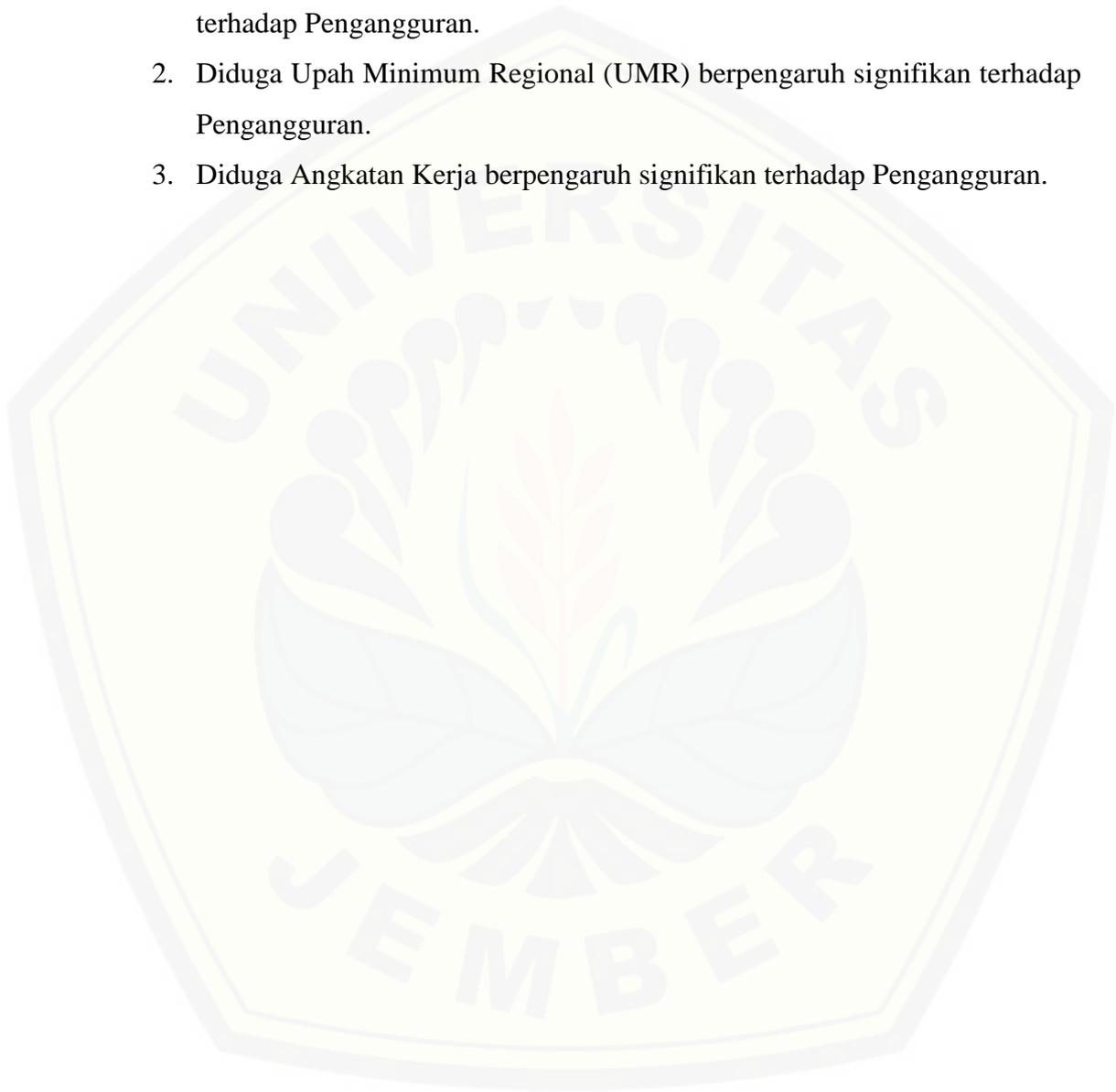


Gambar 2.11 Kerangka Konseptual
 Sumber: data diolah.

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka koneptual tersebut serta landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran.
2. Diduga Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran.
3. Diduga Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory research*. Metode eksplanatori digunakan untuk menggali, mengidentifikasi dan menganalisis besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel, baik secara parsial maupun secara total/utuh pengaruh dari masing-masing faktor atau dimensi dari variabel-variabel penelitian (Kadji, 2016: 40). Metode eksplanatori dalam penelitian ini untuk menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR), dan Angkatan Kerja dengan variabel Pengangguran, karena itu penelitian eksplanatori menggunakan hipotesis dan untuk menguji hipotesis digunakan statistik inferensial (Bungin, 2013: 51).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. (Bungin, 2013: 129). Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 1998: 100). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diperoleh mengenai data kuantitatif tahunan enam provinsi di Pulau Jawa yang berupa data penel selama sembilan tahun, yaitu dari tahun 2008-2016 meliputi data Jumlah Pengangguran di Pulau Jawa dari tahun 2008-2016, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa dari tahun 2008-2016, Upah Minimum Regional (UMR) di Pulau Jawa dari tahun 2008-2016, dan Angkatan Kerja di Pulau Jawa dari tahun 2008-2016.

3.3. Definisi Operasional Variabel

1. Produk domestik regional bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto atas dasar harga pasar merupakan seluruh jumlah nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dengan memperhitungkan nilai tambah produksi (output) dikurangi biaya antara. Dalam penelitian ini PDRB dinyatakan dalam satuan miliar rupiah (Rp).

2. Upah Minimum Regional (UMR)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 78/2015, upah minimum merupakan upah yang terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam penelitian ini UMR dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).

3. Angkatan Kerja

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam penelitian ini angkatan kerja dinyatakan dalam satuan ribu jiwa.

4. Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dalam penelitian ini jumlah pengangguran dinyatakan dalam satuan jiwa.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel merupakan unit individu yang sama (misalnya suatu keluarga atau perusahaan atau bagian negara) disurvei dari waktu ke waktu. Secara singkat, data panel memiliki dimensi ruang dan waktu (Gujarati, 2012: 235). Data dengan karakteristik panel

adalah data yang berstruktururut waktu sekaligus *cross-section* (Arifianto, 2012:148). Adapun persamaan umum estimasi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = b_0 + b_1X_{1it} + e_{it}, i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (5)$$

Dimana:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N × T = banyaknya data panel

Persamaan analisis data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Log } JP_{it} = b_0 + b_1\text{Log}(PDRB)_{it} + b_2\text{Log}(UMR)_{it} + b_3\text{Log}(AK)_{it} + e_{it} \dots(6)$$

Keterangan:

Log JP = Jumlah Pengangguran (jiwa)

Log PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (rupiah)

Log UMR = Upah Minimum Regional (rupiah)

Log AK = Angkatan Kerja (jiwa)

b_0 = Intersep

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Varians Independen

e_{it} = Komponen error di waktu t untuk unit *cross-section* i

i = 1-6 data *cross section* provinsi

t = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 data *time series* 2008 sampai dengan 2016

Data panel memiliki keuntungan-keuntungan dibandingkan dengan data *cross-section* atau data *time-series*. Baltagi (dalam Gujarati, 2012: 237) membuat daftar keuntungan-keuntungan dari data panel sebagai berikut:

1. Data yang berhubungan dengan individu, perusahaan, negara bagian, negara, dan lain-lain, dari waktu ke waktu, ada batasan *heterogenitas* dalam unit-unit tersebut.
2. Dengan menggabungkan antara observasi *time-series* dan *cross-section*, data panel memberi “lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antar variabel, lebih banyak *degree of freedom*, dan lebih efisien.”
3. Dengan mempelajari observasi *cross-section* yang berulang-ulang, data panel paling cocok untuk mempelajari dinamika perubahan. Misalkan tingkat pengangguran, perputaran pekerjaan, dan mobilitas tenaga kerja, adalah paling tepat dipelajari menggunakan data panel.
4. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data *cross-section* murni atau *time-series* murni. Contohnya, dampak dari aturan upah minimum pada ketenagakerjaan dan pendapatan dapat dengan baik dipelajari jika kita memasukkan secara berurutan data peningkatan upah minimum federal dan/atau upah minimum negara bagian.
5. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit. Contohnya, fenomena keekonomian berskala (*economic of scale*) dan perubahan teknologi lebih tepat dipelajari menggunakan data panel daripada data *cross-section* murni atau *time-series* murni.
6. Dengan membuat data menjadi berjumlah beberapa ribu unit, data panel dapat meminimumkan bias yang bisa terjadi jika kita mengagregasi individu-individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam agregasi besar.

Selanjutnya, menurut Basuki dan Yuliadi (dalam Qadrunnada, 2017) terdapat tiga model estimasi dalam analisis regresi data panel. berikut tiga model estimasi data panel, yaitu:

1. *Common Effect Model (CEM)*

Merupakan bentuk estimasi paling sederhana karena hanya menggunakan kombinasi data *time-series* dan data *cross-section* tanpa memperhatikan dimensi waktu maupun individu/wilayah. Sehingga mengasumsikan perilaku setiap

individu sama dalam berbagai kurun waktu. Metode estimasi ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil dalam mengestimasi data panel.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan teknik variabel dummy untuk melihat perbedaan intersep antar individu/wilayah, namun terdapat kesamaan slop antar wilayah. Teknik ini juga sering disebut sebagai *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

3. *Random Effect Model* (REM)

Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar wilayah. Pada model ini perbedaan intersep diakomodasi oleh error term masing-masing wilayah. Keuntungan menggunakan model ini adalah menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga biasa disebut sebagai *Error Component Model* atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

3.4.2. Pengujian Model Estimasi Data Panel

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel lebih baik menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Common Effect Model* (CEM). Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji chow yaitu : Jika H_0 diterima maka digunakan *Common Effect Model* (CEM) dan jika H_0 ditolak maka digunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Jika nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dan jika nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* lebih dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM). Analisis data panel kemudian dilanjutkan dengan uji hausman.

b. Uji Hausman

Uji Hausman adalah uji yang digunakan untuk memilih model *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji hausman adalah jika H_0 diterima maka digunakan *Random Effect Model* (REM) dan jika H_0 ditolak maka digunakan model *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila nilai probabilitas *Cross-section random* kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dan jika nilai probabilitas *Cross-section random* lebih dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier adalah uji yang digunakan untuk memilih model antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan uji LM adalah jika jika H_0 diterima maka digunakan *Common Effect Model* (CEM) dan jika H_0 ditolak maka digunakan *Random Effect Model* (REM). Apabila nilai probabilitas pada *Breusch Pagan* yang ditunjukkan oleh angka yang dibawah kurang dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM) dan jika nilai probabilitas pada *Breusch Pagan* yang ditunjukkan oleh angka yang dibawah lebih dari taraf signifikansi 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

3.4.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki *mean* dan *standar deviasi* yang sama dengan data. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat pengujian *parametric-test* (uji parametrik) adalah data harus memiliki distribusi normal (atau

berdistribusi normal) (Sarjono dan Julianita, 2011: 53). Dalam uji normalitas, peneliti menggunakan metode uji Jarque-Bera (JB) dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera. Jika hasil dari nilai probabilitas JB > nilai probabilitas kritis ($\alpha=5\%$) maka data berdistribusi normal dan jika hasil dari nilai probabilitas JB < nilai probabilitas kritis ($\alpha=5\%$) maka data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan di mana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) yang erat satu sama lain. (Pratisto, 2004:156). Multikolinearitas terjadi pada model regresi dengan lebih dari satu variabel independen (regresi berganda) di mana terjadi korelasi yang kuat antar-variabel independen. Model yang baik tentunya tidak mengalami multikolinearitas (Nawari, 2010: 223). Menurut Gujarati (2010: 429) nilai koefisien korelasi jika melebihi 0,8 maka dapat dikatakan terjangkit multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wijaya (2009: 124), heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan/observasi. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heteroskedastisitas (Sarjono dan Julianita, 2011: 70). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser. Glejser (dalam Ansofino et al, 2016: 44-45) mengatakan bahwa varian, variabel gangguan nilainya tergantung dari variabel independen yang ada di dalam model. Jika nilai probabilitas $t_{hitung} \geq$ nilai kritis ($\alpha = 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa variabel independen tidak terjangkit masalah heteroskedastisitas.

3.5. Uji Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. (Arikunto, 2014: 110). Penelitian menggunakan hipotesis, karena hipotesis sesungguhnya adalah jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan

dilakukan. Dengan hipotesis, penelitian menjadi tidak ngambang, karena dibimbing oleh hipotesis tersebut (Bungin, 2013: 90).

3.5.1. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR) dan Angkatan Kerja yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Pengangguran. Uji F dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Gujarati, 2000: 121):

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)} \dots\dots\dots (8)$$

Keterangan:

- F = pengujian secara bersama-sama
- R^2 = koefisien determinasi
- k = banyaknya variabel
- n = banyaknya observasi (sampel)
- k-1 = derajat bebas pembilang
- n-k = derajat bebas penyebut

Rumusan hipotesa:

H_0 : $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$, artinya secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen;

H_a : $b_1, b_2, b_3, b_4 \neq 0$, artinya secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika probabilitas $F_{hitung} \geq \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika probabilitas $F_{hitung} \leq \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa seluruh variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.2. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR) dan Angkatan Kerja terhadap variabel Pengangguran dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Uji t dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2000: 140):

$$t = \frac{b_i}{Sb_i} \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan:

- t = t_{hitung} (pengujian secara parsial)
 b_i = besarnya perubahan dari variabel bebas
 Sb_i = standar *error* deviasi

Perumusan hipotesis:

$H_0 : b_i = 0$, artinya bahwa secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen;

$H_0 : b_i \neq 0$, artinya bahwa secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen;

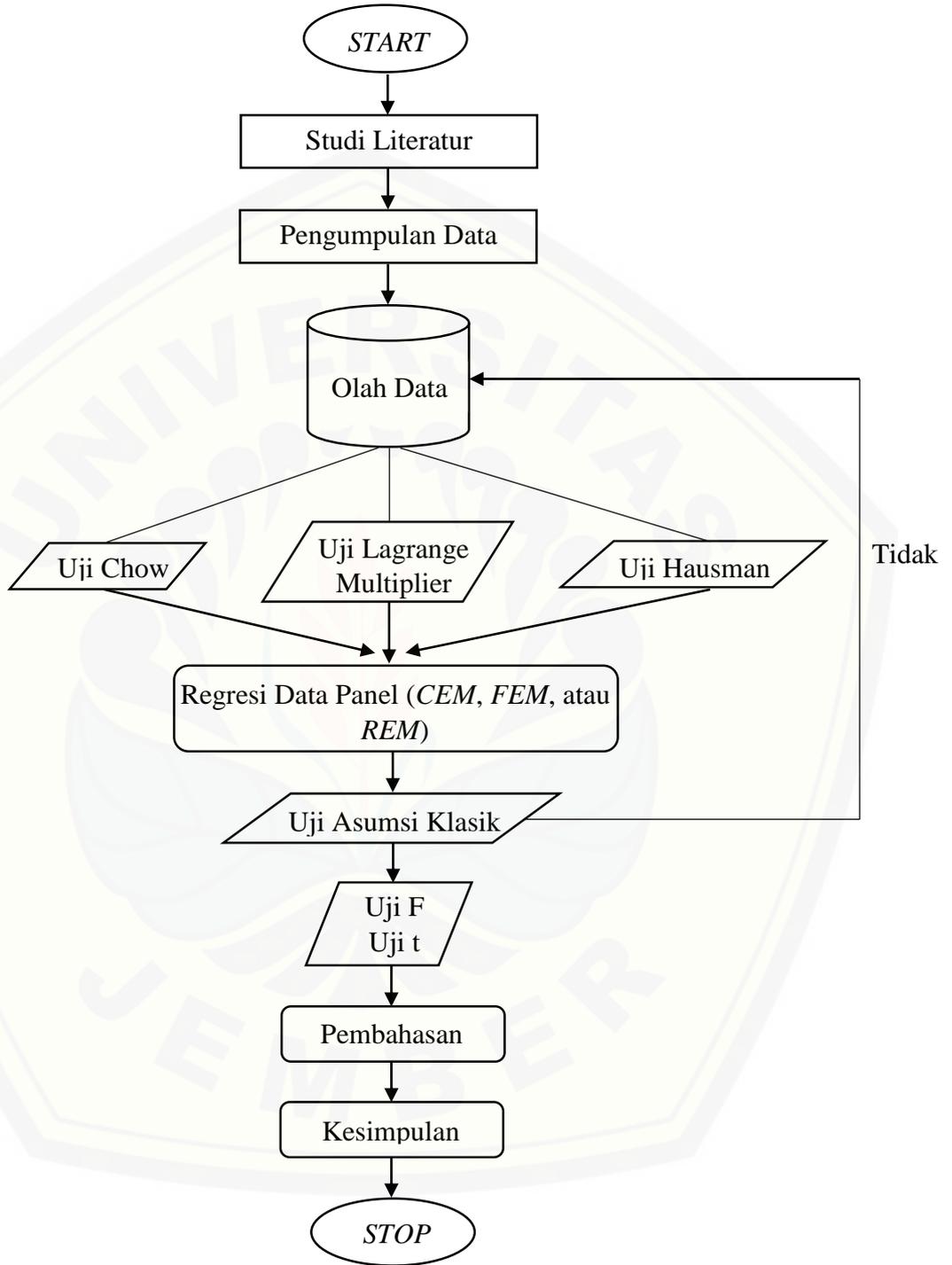
3.5.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Siagian dan Sugiarto (2006: 259) koefisien Determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas terhadap terhadap variabel respon. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh

beragamnya nilai-nilai variabel X). Bila nilai koefisien determinasi sama dengan satu, berarti garis regresi yang terbentuk cocok secara sempurna dengan nilai-nilai observasi yang diperoleh. Dalam hal nilai koefisien determinasi sama dengan satu berarti ragam naik turunnya Y seluruhnya disebabkan oleh X. Dengan demikian, bila nilai X diketahui, nilai Y dapat diramalkan secara sempurna. Jadi, kegunaan determinasi adalah:

1. Sebagai ukuran ketetapan atau kecocokan garis regresi yang dibentuk dari hasil pendugaan terhadap sekelompok data hasil observasi. Makin besar nilai R^2 semakin bagus garis regresi yang terbentuk. Sebaliknya makin kecil nilai R^2 makin tidak tepat garis regresi tersebut dalam mewakili data hasil observasi.
2. Mengukur besar proporsi (presentasi) dari jumlah ragam Y yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan variabel penjelas X terhadap ragam variabel respon Y.

3.6. Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Sumber: Data diolah

Keterangan:

1. *Start* merupakan tahap permulaan dan persiapan penelitian terhadap masalah yang akan diteliti.
2. Melakukan studi literatur untuk pendalaman materi membantu dalam pembahasan hasil penelitian.
3. Pengumpulan data untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian melalui data sekunder.
4. Pengolahan data dilakukan untuk memilih dan memilah data yang sesuai dalam penelitian untuk dapat dianalisis.
5. Uji chow dilakukan untuk mengetahui model yang paling tepat dalam estimasi analisis, yaitu antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model estimasi terbaik antara *Random Effect Model* (REM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), sedangkan uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui model estimasi yang cocok digunakan antara *Random Effect Model* (REM) atau *Common Effect Model* (CEM).
6. Melakukan uji asumsi klasik pada model yang diperoleh, jika data tidak lolos syarat asumsi klasik maka kembali lagi kepada pengolahan data.
7. Melakukan uji hipotesis (uji F dan uji t)
8. Membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
9. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan memberikan saran sesuai dengan hasil penelitian.
10. *Stop* menunjukkan bahwa berakhirnya kegiatan penelitian.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Pulau Jawa tahun 2008-2016. Hal ini karena Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian di Indonesia dan persebaran Industri di Pulau Jawa sangat tinggi sehingga dapat menyerap Pengangguran yang ada di Pulau Jawa.
2. Upah Minimum Regional (UMR) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Pengangguran di Pulau Jawa tahun 2008-2016. Hal ini disebabkan oleh adanya kekuan upah. Upah tidak bisa menyesuaikan sampai pada penawaran sama dengan permintaan tenaga kerja sehingga upah tidak selalu fleksibel.
3. Angkatan Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran di Pulau Jawa tahun 2008-2016. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa sangat besar dan meningkatkan angkatan kerja baru sehingga kesempatan kerja yang ada tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja yang ada di Pulau Jawa.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan perekonomian tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi, khususnya di sektor industri. Maka dari itu peran pemerintah harus dapat mengatur tentang batasan padat modal pada sektor industri yang menyebabkan tenaga kerja tidak terserap karena teori ketergantungan industri menjelaskan adanya teknologi impor yang relatif padat modal akan memperlambat laju pertumbuhan lapangan kerja.

2. Upah minimum sangat erat kaitannya dengan buruh dan pengusaha, maka dari itu pemerintah harus menjadi pemutus kebijakan dalam keseimbangan antara pihak buruh dan pengusaha untuk menetapkan upah sesuai kondisi riil dengan menelaah kembali kebijakan tentang undang-undang upah minimum. Selain itu, para pekerja biasanya menerima upah di bawah standar upah minimum agar dapat bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal ini.
3. Angkatan kerja yang banyak menuntut adanya persaingan yang ketat, maka dari itu para pekerja harus meningkatkan keterampilan (kualitas sumber daya manusia) agar dapat masuk ke dalam pasar kerja sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, dengan adanya keterbatasan lowongan pekerjaan, masyarakat tidak hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang tersedia, tetapi dapat menciptakan peluang usaha (wirausaha) karena selain mempunyai usaha sendiri, para pengusaha dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menganalisis pengangguran dengan variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini sehingga dapat membantu kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A. 1990. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Ansofino, et al. 2016. *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Arfida. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ariefianto, M. D. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, S. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. *Penguatan Ekonomi Daerah: Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global*. Mei. Jakarta: BAPPENAS.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2008-2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2016*. November. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008 – 2017*. April. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dan rata-rata Nasional per tahun (Dalam Rupiah), 1997-2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Basuki, D. B. T. 2016. Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Skripsi*. Jember: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Bungin, M. B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Christianus, S. 2010. *Belajar Kilat SPSS 17*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Dornbusch. 2008. *Makroekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Gani, I. dan Amalia, S. 2015. *Alat Analisis Data Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ghozali, I. 2014. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 22*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. 2000. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- , 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 1 Edisi 5*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- , 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2 Edisi 5*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Hartanto, T. B dan S. U. Masjkiri. 2017. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kotaprovinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *JIET Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*. 02(1): Hal 21-30.
- Jhingan, M. L. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kadji, Y. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Kuncoro, M. 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuntiarti, D. D. 2017. Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, Dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lipsey, R. G., P. N. Courant, D. D. Purvis, dan P. O. Steiner. 1997. *Pengantar Makroekonomi Edisi Kesepuluh Jilid Dua*. Jakarta: Binaruka Aksara.
- Mankiw, N. G. 2007. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- , 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Maravian, B. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 1986 – 2013. *Universitas Jember Digital Repository*.

- Nawari. 2010. *Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurjanah, M. I. 2017. Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2015. *Skripsi*. Surakarta: Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transimgrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008. *Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit*. 30 Desember 2008. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015. *Pengupahan*. 23 Oktober 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237. Jakarta.
- Pratisto, A. 2004. *Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Puspadjuita, E. A. R. 2018. Factors that Influence the Rate of Unemployment in Indonesia. *International Journal of Economics and Finance*. 10(1)
- Qadrunnada, L. 2017. Analisis Pengaruh Pendidikan Pertumbuhan Ekonomi Dan Rasio Gini Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. *Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rusli, S. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES
- Samuelson, P. A dan Nordhaus, W. D. 1992. *Makroekonomi Edisi Keempatbelas*. Jakarta: Erlangga.
- Sarjono, H, dan Julianita, W. 2011. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, D dan Sugiarto. 2006. *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Simanjuntak, P. J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Edisi 2001*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabet.

- Sukirno, S. 1999. *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2000. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- , 2008. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susanti, H, Ikhsan, M dan Widyanti. 2000. *Indikator-indikator Makroekonomi Edisi kedua*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tarigan, R. 2015. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjiptoherijanto, P. 1996. *Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Umar, Husein. 1998. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. *Ketenagakerjaan*. 25 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta.
- Yudawisastra, H. G. 2013. Effect of Minimum wage, GDP and population against Open unemployment rate in West Java in 2010-2013. *Widyatama Repository*.
- Website:
- Candra, S. A. 2017. BPS: Pulau Jawa Kuasai 60 Persen Usaha Ekonomi Indonesia. <http://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/04/27/op28b2382-bps-pulau-jawa-kuasai-60-persen-usaha-ekonomi-indonesia>. [Diakses pada 8 Maret 2018].
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pemerintah Andalkan Pertumbuhan Industri Pulau Jawa. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/2806/Pemerintah->

[Andalkan%09Pertumbuhan-Industri-Pulau-Jawa.](#) [Diakses pada 10 Maret 2018].

Kompas Wisata. Peta Pulau Jawa. <https://kompaswisata.com/wp-content/uploads/2016/11/pulau-jawa.jpg>. [Diakses pada 20 Februari 2018].



LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Data Jumlah Pengangguran (JP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR), dan Angkatan Kerja di Pulau Jawa Tahun 2008-2016

Provinsi Banten

Tahun	JP (jiwa)	PDRB (Miliar)	UMR (Rupiah)	AK (Ribuan Jiwa)
2008	656560	139865	837000	4325.4
2009	652462	152556	917500	4357.2
2010	726377	271465	955300	5309.4
2011	696811	306174	1000000	5072.9
2012	514783	388225	1042000	5177.1
2013	494170	377836	1170000	5181.7
2014	484053	428740	1325000	5338
2015	509383	478544	1600000	5334.8
2016	498596	516327	1784000	5587

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2017.

Provinsi DKI Jakarta

Tahun	JP (jiwa)	PDRB (Miliar)	UMR (Rupiah)	AK (Ribuan Jiwa)
2008	580511	677045	972604	4772.4
2009	569337	757697	1069865	4687.7
2010	582843	1075183	1118009	5272.6
2011	599515	1224218	1290000	5128.1
2012	516136	1369433	1529150	5339.9
2013	440704	1546876	2200000	5108.9
2014	429110	1762316	2441000	5063.4
2015	368190	1989330	2700000	5092.2
2016	317007	2177120	3100000	5178.8

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2017.

Provinsi Jawa Barat

Tahun	JP (jiwa)	PDRB (Miliar)	UMR (Rupiah)	AK (Ribu Jiwa)
2008	2263584	633283	568193	18743.9
2009	2079830	689841	628191	18981.2
2010	1951391	906686	671500	18893.8
2011	1926537	1021629	732000	19334
2012	1859141	1128246	780000	20474.8
2013	1888667	1258989	850000	20620.6
2014	1775196	1385825	1000000	21006.1
2015	1794874	1524832	1000000	20586.3
2016	1873861	1652589	2250000	21075.8

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2017.

Jawa Tengah

Tahun	JP (jiwa)	PDRB (Miliar)	UMR (Rupiah)	AK (Ribu Jiwa)
2008	1227308	367136	547000	16690.9
2009	1252267	397904	575000	17087.6
2010	1046883	623225	660000	16856.3
2011	1203342	692562	675000	17026.1
2012	982093	754529	765000	17513.4
2013	1054062	830016	830000	17524
2014	996344	922471	910000	17547
2015	863783	1011851	910000	17298.9
2016	801330	1092031	1265000	17312.4

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2017.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	JP (jiwa)	PDRB (Miliar)	UMR (Rupiah)	AK (RibU Jiwa)
2008	107529	38102	586000	1999.7
2009	121046	41407	700000	2016.6
2010	107148	64679	745694	1882.2
2011	84494	71370	808000	1924.3
2012	77397	77248	892660	1983.5
2013	63172	84925	947114	1949.2
2014	67418	92842	988500	2023.4
2015	80245	101488	988500	1971.4
2016	57036	110098	1237700	2099.4

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2017.

Provinsi Jawa Timur

Tahun	JP (jiwa)	PDRB (Miliar)	UMR (Rupiah)	AK (RibU Jiwa)
2008	1296313	621392	500000	20178.5
2009	1033512	686848	570000	20338.5
2010	828943	990649	630000	19527
2011	1050333	1120577	705000	19513.9
2012	828615	1248767	745000	20167.5
2013	878543	1382501	866250	20432.4
2014	843490	1537948	1000000	20149.9
2015	906904	1692903	1000000	20274.6
2016	839283	1855043	1273700	19953.8

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2017.

LAMPIRAN B

Data Penelitian di LOG

Provinsi	Tahun	LOG JP	LOG PDRB	LOG UMR	LOG AK
DKI Jakarta	2008	5.763810454	5.830618	5.987936	3.678737
DKI Jakarta	2009	5.755369409	5.879496	6.029329	3.67096
DKI Jakarta	2010	5.765551585	6.031482	6.048445	3.722025
DKI Jakarta	2011	5.777800054	6.087859	6.11059	3.709956
DKI Jakarta	2012	5.712764152	6.136541	6.18445	3.727533
DKI Jakarta	2013	5.644146992	6.189456	6.342423	3.708327
DKI Jakarta	2014	5.632568635	6.246084	6.387568	3.704442
DKI Jakarta	2015	5.566071989	6.298707	6.431364	3.706905
DKI Jakarta	2016	5.501068852	6.337882	6.491362	3.714229
Jawa Barat	2008	6.354796615	5.801598	5.754496	4.27286
Jawa Barat	2009	6.318027838	5.838749	5.798092	4.278324
Jawa Barat	2010	6.290344298	5.957457	5.827046	4.276319
Jawa Barat	2011	6.284777354	6.009293	5.864511	4.286322
Jawa Barat	2012	6.269312329	6.052404	5.892095	4.31122
Jawa Barat	2013	6.276155392	6.100022	5.929419	4.314301
Jawa Barat	2014	6.249246311	6.141708	6	4.322345
Jawa Barat	2015	6.254033967	6.183222	6	4.313578
Jawa Barat	2016	6.272737372	6.218165	6.352183	4.323784
Jawa Tengah	2008	6.088953565	5.564827	5.737987	4.22248
Jawa Tengah	2009	6.097696936	5.599778	5.759668	4.232681
Jawa Tengah	2010	6.019898147	5.794645	5.819544	4.226762
Jawa Tengah	2011	6.080389075	5.840459	5.829304	4.231115
Jawa Tengah	2012	5.992152616	5.877676	5.883661	4.24337
Jawa Tengah	2013	6.022866157	5.919086	5.919078	4.243633
Jawa Tengah	2014	5.99840931	5.964953	5.959041	4.244203
Jawa Tengah	2015	5.936404653	6.005117	5.959041	4.238018
Jawa Tengah	2016	5.903811402	6.038235	6.102091	4.238357
DI Yogyakarta	2008	5.031525607	4.580948	5.767898	3.300965
DI Yogyakarta	2009	5.082950443	4.617074	5.845098	3.30462
DI Yogyakarta	2010	5.029984069	4.810763	5.872561	3.274666
DI Yogyakarta	2011	4.92682587	4.853516	5.907411	3.284273
DI Yogyakarta	2012	4.888724127	4.887887	5.950686	3.297432
DI Yogyakarta	2013	4.800524627	4.929036	5.976402	3.289856
DI Yogyakarta	2014	4.828775865	4.967744	5.994977	3.306082
DI Yogyakarta	2015	4.904417981	5.006415	5.994977	3.294775
DI Yogyakarta	2016	4.75614906	5.041779	6.092615	3.322095
Jawa Timur	2008	6.112709876	5.793366	5.69897	4.304889

Jawa Timur	2009	6.014315524	5.836861	5.755875	4.308319
Jawa Timur	2010	5.918524669	5.99592	5.799341	4.290636
Jawa Timur	2011	6.021327011	6.049442	5.848189	4.290344
Jawa Timur	2012	5.918352791	6.096481	5.872156	4.304652
Jawa Timur	2013	5.943763023	6.140665	5.937643	4.310319
Jawa Timur	2014	5.926079938	6.186942	6	4.304273
Jawa Timur	2015	5.957561317	6.228632	6	4.306952
Jawa Timur	2016	5.923908426	6.268354	6.105067	4.300026
Banten	2008	5.81727442	5.145709	5.922725	3.636026
Banten	2009	5.814555223	5.183429	5.962606	3.639207
Banten	2010	5.861162084	5.433714	5.98014	3.725045
Banten	2011	5.843114998	5.485968	6	3.705256
Banten	2012	5.711624196	5.589083	6.017868	3.714087
Banten	2013	5.693876377	5.577303	6.068186	3.714472
Banten	2014	5.684892916	5.632194	6.122216	3.727379
Banten	2015	5.707044447	5.679922	6.20412	3.727118
Banten	2016	5.69774879	5.712925	6.251395	3.747179

LAMPIRAN CHasil Estimasi *Panel Data Model Common Effect Model (CEM)*

Dependent Variable: JP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/12/18 Time: 06:27
 Sample: 2008 2016
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.718327	1.580695	1.719704	0.0917
PDRB	0.237580	0.152732	1.555533	0.1261
UMR	-0.230007	0.280593	-0.819719	0.4163
AK	0.781792	0.185532	4.213782	0.0001
R-squared	0.828073	Mean dependent var		5.771239
Adjusted R-squared	0.817758	S.D. dependent var		0.439301
S.E. of regression	0.187537	Akaike info criterion		-0.438495
Sum squared resid	1.758505	Schwarz criterion		-0.291163
Log likelihood	15.83937	Hannan-Quinn criter.		-0.381675
F-statistic	80.27393	Durbin-Watson stat		0.127165
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN DHasil Estimasi *Panel Data Model Fixed Effect Model (FEM)*

Dependent Variable: JP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/12/18 Time: 06:26
 Sample: 2008 2016
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.674087	1.550930	3.013731	0.0042
PDRB	-0.362193	0.091353	-3.964759	0.0003
UMR	-0.108419	0.097664	-1.110122	0.2728
AK	0.974387	0.430416	2.263827	0.0285

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990199	Mean dependent var	5.771239
Adjusted R-squared	0.988457	S.D. dependent var	0.439301
S.E. of regression	0.047198	Akaike info criterion	-3.117924
Sum squared resid	0.100244	Schwarz criterion	-2.786427
Log likelihood	93.18395	Hannan-Quinn criter.	-2.990079
F-statistic	568.3140	Durbin-Watson stat	1.569520
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN E**Hasil Estimasi Panel Data Model Random Effect Model (REM)**

Dependent Variable: JP
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 04/12/18 Time: 06:27
 Sample: 2008 2016
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 54
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.052755	0.515394	7.863419	0.0000
PDRB	-0.115339	0.074181	-1.554828	0.1263
UMR	-0.303473	0.089936	-3.374329	0.0014
AK	1.069611	0.102986	10.38594	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.059166	0.6111
Idiosyncratic random			0.047198	0.3889
Weighted Statistics				
R-squared	0.697144	Mean dependent var		1.483075
Adjusted R-squared	0.678972	S.D. dependent var		0.134488
S.E. of regression	0.076200	Sum squared resid		0.290322
F-statistic	38.36491	Durbin-Watson stat		0.578402
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.747851	Mean dependent var		5.771239
Sum squared resid	2.579042	Durbin-Watson stat		0.065111

LAMPIRAN F

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	148.880593	(5,45)	0.0000
Cross-section Chi-square	154.689179	5	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: JP
Method: Panel Least Squares
Date: 04/12/18 Time: 06:27
Sample: 2008 2016
Periods included: 9
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.718327	1.580695	1.719704	0.0917
PDRB	0.237580	0.152732	1.555533	0.1261
UMR	-0.230007	0.280593	-0.819719	0.4163
AK	0.781792	0.185532	4.213782	0.0001
R-squared	0.828073	Mean dependent var		5.771239
Adjusted R-squared	0.817758	S.D. dependent var		0.439301
S.E. of regression	0.187537	Akaike info criterion		-0.438495
Sum squared resid	1.758505	Schwarz criterion		-0.291163
Log likelihood	15.83937	Hannan-Quinn criter.		-0.381675
F-statistic	80.27393	Durbin-Watson stat		0.127165
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN G**Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	108.5880 (0.0000)	0.267002 (0.6054)	108.8550 (0.0000)
Honda	10.42056 (0.0000)	0.516722 (0.3027)	7.733824 (0.0000)
King-Wu	10.42056 (0.0000)	0.516722 (0.3027)	8.495014 (0.0000)
Standardized Honda	15.11162 (0.0000)	0.886179 (0.1878)	6.859991 (0.0000)
Standardized King-Wu	15.11162 (0.0000)	0.886179 (0.1878)	8.133712 (0.0000)
Gourierioux, et al.*	--	--	108.8550 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

LAMPIRAN H

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	83.327213	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	-0.362193	-0.115339	0.002843	0.0000
UMR	-0.108419	-0.303473	0.001450	0.0000
AK	0.974387	1.069611	0.174651	0.8198

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: JP

Method: Panel Least Squares

Date: 04/12/18 Time: 06:28

Sample: 2008 2016

Periods included: 9

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.674087	1.550930	3.013731	0.0042
PDRB	-0.362193	0.091353	-3.964759	0.0003
UMR	-0.108419	0.097664	-1.110122	0.2728
AK	0.974387	0.430416	2.263827	0.0285

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.990199	Mean dependent var	5.771239
Adjusted R-squared	0.988457	S.D. dependent var	0.439301
S.E. of regression	0.047198	Akaike info criterion	-3.117924
Sum squared resid	0.100244	Schwarz criterion	-2.786427
Log likelihood	93.18395	Hannan-Quinn criter.	-2.990079
F-statistic	568.3140	Durbin-Watson stat	1.569520
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN I

Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 04/12/18 Time: 06:29
 Sample: 2008 2016
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.343535	0.873387	-0.393337	0.6959
PDRB	0.001546	0.051444	0.030057	0.9762
UMR	0.032025	0.054998	0.582293	0.5633
AK	0.044916	0.242383	0.185308	0.8538

Effects Specification

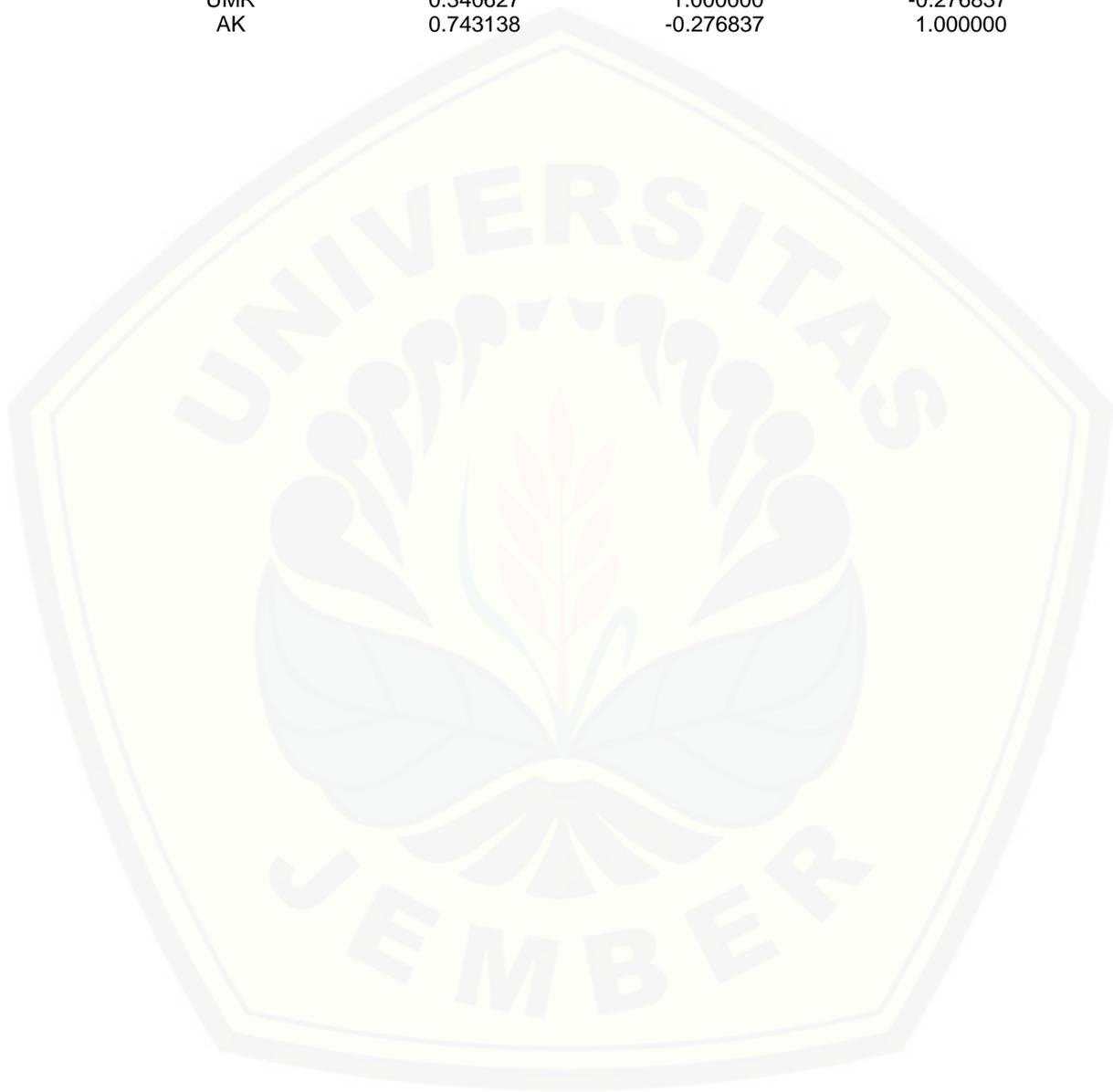
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.209333	Mean dependent var	0.033344
Adjusted R-squared	0.068771	S.D. dependent var	0.027543
S.E. of regression	0.026579	Akaike info criterion	-4.266386
Sum squared resid	0.031790	Schwarz criterion	-3.934889
Log likelihood	124.1924	Hannan-Quinn criter.	-4.138541
F-statistic	1.489251	Durbin-Watson stat	1.833884
Prob(F-statistic)	0.188030		

LAMPIRAN J

Uji Multikolinearitas

	PDRB	UMR	AK
PDRB	1.000000	0.340627	0.743138
UMR	0.340627	1.000000	-0.276837
AK	0.743138	-0.276837	1.000000



LAMPIRAN K

Uji Normalitas

